e-news letter
AGUSTUS I 2020
PKSPARLEMEN
KREAT SUBSTANTIF

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hj. Nevi Zuairina

AJAK KAUM PEREMPUAN MAKNAI IDUL ADHA

Bersyukur Moment Dua Hari Raya

Sungguh negara harus banyak berterima kasih kepada kearifan lokal (local wisdom) dan nilai agama (religious value) yang ada di bumi Nusantara, utamanya Islam. Pasca dunia terserang pagebluk covid 19, tata kelola dunia seakan dikocok ulang dan makna kemapanan sirna

BERKURBAN BERBAGI DAN TERUS MELAYANI
SELAMAT IDUL ADHA 1441 H

Setiap negara menyesuaikan diri dengan pagebluk Covid 19, utamanya dibidang medis dan ekonomi. Beragam riset digalakan namun belum ada titik terang yang paripurna. Mencoba menyesuaikan diri dengan apa yang sedang terjadi.

Sungguh negara harus banyak berterima kasih kepada kearifan lokal (local wisdom) dan nilai agama (religious value) yang ada di bumi Nusantara, utamanya Islam. Pasca dunia terserang pagebluk covid 19, tata kelola dunia seakan dikocok ulang dan makna kemapanan sirna. Jika saja tidak ada kearifan lokal tersebut entah lonjakan angka covid 19 yang saat ini berada dipuncak, bisa jadi dampaknya lebih buruk lagi. Moment dua hari raya terbukti menjadi 'healing' dan 'bantalan' yang sangat efektif dalam meredam gejolak covid 19.

Saat Ramadhan jutaan orang melakuan aktivitas zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS) hingga kemudian dirasakan oleh pelipatgandaan orang lainnya. Pun saat Idul Qurban, ratusan ribu hewan Qurban dipotoing kemudian disebar. Sahih telah memberikan asa yang luar biasa bagi mereka yang papa. Bisa dibayangkan jika semua energi besar ini hanya ditumpukan kepada negara semata, sangat mungkin bisa jadi tumbang sebelum waktunya. Terlebih dengan grand design penanganan Covid 19 yang jauh dari jelas dan sistematis.

Tengok saja kini dunia dan kita yang ada di dalamnya terancam resesi ekonomi, seperti Singapura minus 6,8 persen, Malaysia minus 8 persen, Amerika minus 9,7 persen, Inggris minus 15,4 persen, Jerman 11,2 persen, Prancis minus 17,2 persen, Jepang minus 8,3 persen. Bahkan IMF pun memprediksi output ekonomi dunia tahun ini akan menyusut hampir 5 persen, atau hampir 2 persen lebih buruk dari perkiraan yang dirilis pada bulan April. Namun demikin bukan saatnya bilang "semua negara kena resesi".

Pemerintah seharusnya lebih fokus dalam penanganan dampak Covid-19. Pemerintah jangan sampai menganggap remeh aspek kesehatan rakyat. Hampir semua kalangan mengeluhkan soal lambatnya penanganan Covid-19 ini. Bahkan Presiden Jokowi sendiri juga mengeluhkan soal ini, buktinya akhir-akhir ini sering marah dan sindir-sindir Menteri sendiri.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencatatkan angka negatif 5,2 persen (yoy) atau negatif 4,9 persen (qoq). Secara kumulatif pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Semester 1-2020 dibandingkan dengan Semester I-2019 terkontraksi 1,26 persen. Perlu ada evaluasi berkala terhadap seluruh program pemulihan ekonomi nasional, sehingga biaya yang dikeluarkan dengan ongkos yang mahal tidak sia-sia. Sedianya program-program tersebut dapat menyelamatkan atau setidaknya membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak terlalu terjun bebas seperti yang dilaporkan sekarang ini.

Presiden Jokowi berulang kali mengeluhkan rendahnya serapan anggaran belanja, terutama terkait dengan penanganan pandemi Covid-19 yang mencapai Rp695 triliun. Jokowi menyoroti realisasi dana stimulus Covid-19 yang baru terealisasi senilai Rp141 triliun atau 20,2% dari yang telah dianggarkan. Terlihat aneh sih, tapi ini terjadi. Kuasa anggaran tidak punya kuasa menyerap anggaran. Padahal sudah dibekali modal luar biasa: politik, anggaran dan regulasi. Aneh ya, sungguh ini terjadi...

HUMAS FPKS DPR RI

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

عيد أضحى مبارك

تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال
وادام الله علينا وعليكم نعمه..
ويرزقنا واياكم لذة الطاعة والعبادة..
ويحفظنا واياكم من كل بلاء الدنيا
وعذاب الاخرة.
كل عام وانتم بخير

د/جـــــزولى جوينـــى
رءيس كتلة العدالة والرفاه

Nevi Zuairina Ajak Kaum Perempuan Maknai Idul Adha

BERKURBAN BERBAGI DAN TERUS MELAYANI

SELAMAT IDUL ADHA 1441 H

Padang (31/07) --- Anggota DPR RI daerah Pemilihan Sumatera Barat II, Nevi Zuairina mengajak kaum perempuan seluruh Indonesia untuk memaknai Idul Adha sebagai momentum Pengabdian dan Pengorbanan bagi kaum perempuan.

Nevi mengatakan, bahwa peristiwa bersejarah ribuan tahun yang tak akan hilang hingga zaman berakhir ini bukan saja melekat pada peristiwa dua orang Ayah dan Anak yang menjalankan perintah Tuhannya.

Namun telah melekat juga, pelaku sosok perempuan yang dalam peristiwa hidupnya menjalani ujian kesabaran, kepasrahan tawakkal atas perintah Tuhannya sekaligus ketaatan akan pembawa risalah yang maha pencipta melalui Suaminya sebagai Nabi dan Utusan ummat di muka bumi.

"Beliaulah sosok Hajar, sang bunda ummat, yang telah melahirkan Ismail, Moyang dari Utusan terakhir di muka Bumi. Bunda Hajar adalah sosok simbol ketaatan, kesabaran dan pengorbanan pada peristiwa Hijrahnya seorang Ibu yang mengandung menjelang kelahiran, dan pengorbanan Ibu beserta bayi merah baru lahir di tengah tempat asing tanpa penghuni demi menjalankan perintah tuhannya", ujar Nevi.

Politisi PKS ini mengajak seluruh kaum perempuan bangsa ini, untuk semakin memperkuat makna iedul Adha akan andilnya perempuan di muka bumi menjadi bagian penting tonggak sejarah yang tidak muncul di permukaan. Tanggal 8,9 dan 10 Hijjah 1441 H, ada kenangan syariat yang dilakukan ummat Islam dari peristiwa keluarga Nabi Ibrahim, Nabi Isma'il dan Bunda Hajar.

Nevi mengatakan, Banyak sekali sejarah penting yang terjadi, baik yang dikenang maupun yang tidak dikenang ada andil perempuan yang sangat besar. Tapi sebagian besar, peran itu tidak dimunculkan. Tapi peran bunda Hajar, akan dikenang sepanjang masa salah satunya ritual syariat bagi ummat yang beribadah ummroh maupun haji dalam bentuk Sya'i.

Ibadah Sa'i merupakan salah satu rukun umrah yang dilakukan dengan berjalan kaki (berlari-lari kecil) bolak-balik 7 kali dari Bukit Shafa ke Bukit Marwah dan sebaliknya. Kedua bukit yang satu sama lainnya berjarak sekitar 405 meter.

Bukan hanya itu, lanjut Nevi, Kenangan munculny air yang sangat fenomenal atas izin Allah juga ada peran Hajar dan bayinya Isma'il.

Setiap meminum air zam zam, imbuhnya, kenangan ditemukannya air di padang pasir gersang ini menjadi ingatan yang selalu muncul betapa besar keagungan yang maha kuasa memberikan rahmat kasih dan sayang kepada hambanya.

"Pengorbanan itu bukan bertujuan untuk mendapatkan sesuatu. Tetapi pengorbanan itu atas perintah, tanpa harus tau maksud dan tujuannya. Inilah makna taat sesungguhnya. Perempuan Indonesia, Berkorban, Mengabdi dan Taat tanpa syarat, untuk mewujudkan kesempurnaan perempuan di sisi sang pencipta. Mari kita terus memaknai idul Adha ini, untuk perempuan Indonesia yang semakin berwibawa dan bersahaja", tutup Nevi Zuairina.

HNW Ajak Masyarakat Peduli terhadap Korban Covid-19 di Hari Raya Idul Kurban

Untuk mereka, selain diberikan daging kurban, juga dibagikan sembako, vitamin dan masker, dengan harapan itu semua akan menguatkan asupan gizi selama isolasi mandiri, dan sarana untuk sembuh selamat dari Covid-19,

Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI Jakarta II

BERKURBAN BERBAGI DAN TERUS MELAYANI
SELAMAT IDUL ADHA 1441 H

Jakarta (04/08) --- Pada momentum Idul Adha 1441 H, Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid mengajak kaum muslimin untuk tetap peduli dan berbagi, khususnya kepada korban terdampak Covid-19 di Tanah Air

Menurut pria yang akrab disapa HNW ini, Covid-19 di Indonesia belum ada tanda-tanda akan mereda. Jumlah terpapar semakin banyak dan jenis clusternyapun kian meluas.

"Maka selain mengingatkan melalui khutbah Idul Adha agar semua pihak (dimulai dari Pemerintah) betul-betul komitmen berdisiplin laksanakan protokol covid-19, juga mengingatkan Pemerintah agar betul-betul serius dan fokus melaksanakan kewajibannya untuk melindungi seluruh Rakyat Indonesia, termasuk melaksanakan janji dan kewajiban terhadap para Tenaga Kesehatan (Dokter dan Perawat), Pahlawan Kemanusiaan yang berada di garda terdepan tangani pasien Covid-19, yang ternyata juga sudah banyak yang gugur terpapar Covid-19," papar HNW.

Selain itu, HNW yang juga merupakan Wakil Ketua MPR RI ini, pada saat Idul Kurban kemarin menyalurkan 16 ekor sapi dan 7 ekor kambing di Daerah Pemilihannya, yaitu di Dapil DKI Jakarta II (Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Luar Negeri).

Disamping itu HNW juga membagikan daging kurban untuk warga-warga yang mengisolasi diri karena terkena Covid-19.

"Untuk mereka, selain diberikan daging kurban, juga dibagikan sembako, vitamin dan masker, dengan harapan itu semua akan menguatkan asupan gizi selama isolasi mandiri, dan sarana untuk sembuh selamat dari Covid-19," terang Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini.

Selain untuk mereka, kata HNW, daging kurban juga dibagikan kepada penjaga makam/kuburan, security/satpam, yayasan yatim, majlis taklim, jemaah masjid/musholla dan para dhuafa lainnya.

"Selain via struktur dan kader/simpatisan PKS, pembagian daging kurban juga dikerjasamakan dengan beberapa Ormas di Jakarta," imbuhnya.

Menurut HNW, Idul Kurban dan hari-hari tasyriq (3 hari sesudah Idul Kurban) bisa dijadikan penguatan kepedulian yang menguatkan kohesi sosial di tengah kecemasan meluas akibat Covid-19 dan dampak-dampak negatifnya.

"Dengan menguatkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathoniyah, dan ukhuwah Basyariah. Termasuk juga ukhuwah kepada warga korban Covid-19 yang sedang mengisolasi diri. Spirit beragama yang positif ini hendaknya tetap dijaga dan dikembangluaskan untuk hari-hari sesudah hari-hari Idul Adha, sebagai salah satu kontribusi nyata atasi dampak-dampak pandemi Korona", tutup HNW penuh harap.

Khutbah Idul Adha

Nurhasan: Mari Tingkatkan Kepedulian Sosial Umat Islam

Disaat-saat inilah sesungguhnya pisau keimanan hamba diasah dengan sapaan kelembutan Ilahi, hingga tajam dan kemilaunya sanggup membelah semua kesulitan

H. NURHASAN ZAIDI, S.Sos.I
Anggota Komisi VIII DPR RI

BERKURBAN BERBAGI DAN TERUS MELAYANI
SELAMAT IDUL ADHA 1441 H

Majalengka (01/08) --- Idul Adha merupakan sarana peningkatan kepedulian sosial umat Islam, ungkap Anggota DPR RI Fraksi PKS, Nurhasan Zaidi.

Hal itu ia sampaikan dalam khutbahnya saat perayaan Idul Adha 1441 H, Jum'at (31/7), di Lapangan Madrasah Darul Ulum PUI Majalengka.

"Makna dan hakikat qurban yaitu sebagai sarana mengokohkan keimanan dan bentuk ketaatan atas perintah Allah sekaligus menjadi sarana peningkatan kepedulian sosial umat Islam kepada sesama," tuturnya.

Apalagi, katanya, dimasa-masa sulit ditengah pandemi Covid ini, berbagi adalah solusi bagi mereka yang benar-benar terdampak.

Menurutnya, Idul Adha merupakan momentum yang tepat bagi umat Islam untuk terus menjaga kedekatan dan kepasrahan diri pada Allah serta peduli dan berbagi kebahagiaan diantara sesama.

"Kita niatkan qurban ini ikhlas lillahi ta'ala dan semoga Allah menerima ibadah kurban kita. Selanjutnya kita berharap daging kurban yang akan di distribusikan panitia dapat diterima dengan senang dan bahagia oleh saudara-saudara kita," tukasnya.

Nurhasan mengingatkan bahwa dalam kondisi sulit dan kritis saat ini, keshabaran dan kesiapan berkorban seorang hamba akan teruji.

"Disaat-saat inilah sesungguhnya pisau keimanan hamba diasah dengan sapaan kelembutan Ilahi, hingga tajam dan kemilaunya sanggup membelah semua kesulitan", lanjutnya.

Diakhir khutbahnya, Nurhasan berpesan kepada jamaah untuk bangkit bersama, saling bahu membahu, optimis menghadapi dan melewati krisis, menggairahkan dan menghangatkan kembali nilai keimanan serta ketakwaan pada sang Pencipta.

"Insyaallah, dengan ketakwaan dan kepasrahan diri kita pada Allah, Allah akan memberikan bagi kita jalan keluar dan rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka", pungkasnya.

Anis Ajak Masyarakat Teladani Keluarga Nabi Ibrahim, Berkontribusi untuk Peradaban

Jadikan momentum Idul Adha tahun ini sebagai sarana dalam meneladani keluarga Nabi Ibrahim *alayhissalam*. Kita berdoa, semoga amal kurban ini diterima Allah SWT dan diberikan keberkahan kepada warga Jakarta Timur khususnya

Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si
Anggota Komisi XI DPR RI

BERKURBAN BERBAGI DAN TERUS MELAYANI

SELAMAT IDUL ADHA 1441 H

Jakarta (01/08) --- Hari Raya Idul Adha tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Masyarakat Indonesia dan dunia saat ini masih menghadapi pandemik Covid-19 yang berdampak kepada seluruh segmen kehidupan.

Pada Hari Raya Kurban tahun ini, Anis Byarwati, legislator dari Fraksi PKS Dapil DKI 1, berbagi kurban 4 ekor sapi dan 23 ekor kambing.

"Empat ekor sapi masing masing disaluran ke DPP PKS, DPD PKS Jakarta Timur, DPC PKS Kramat Jati dan Tual - Maluku," sebut Anis.

Sementara, lanjutnya, 23 ekor kambing yang dipilihnya adalah kambing Boer, yaitu salah satu jenis kambing pedaging.

"Kambing tersebut dibagi ke sembilan DPC PKS, yang ada di Jakarta Timur sejumlah 18 ekor, 1 ekor kambing untuk DPRa PKS Pondok Ranggon Jakarta Timur, 1 ekor kambing untuk Garuda Keadilan Jakarta, 1 ekor kambing untuk Palestina dan 2 ekor kambing untuk Ibu dan almarhum ayahnya", urainya.

Anis berpesan kepada kaum muslimin, agar momentum Idul Adha tahun ini dijadikan sarana dalam meneladani keluarga Nabi Ibrahim AS.

"Kita berdoa, semoga amal kurban ini diterima Allah SWT dan diberikan keberkahan kepada warga Jakarta Timur khususnya", pungkas Anis mengakhiri.

Semarak Idul Qurban

Saadiah Uluputty Salurkan Sejumlah Hewan Kurban

"Banyak kalangan yang ikut menyalurkan hewan kurban. Momentum Idul kurban sangat baik. Daging kurban dapat disalurkan pada penerima dari kelompok miskin dan rentan secara ekonomi. Ini cara kita berempati"

SAADIAH ULUPUTTY, S.T
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Maluku

BERKURBAN BERBAGI DAN TERUS MELAYANI
SELAMAT IDUL ADHA 1441 H

Ambon (02/07) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Dapil Maluku, Saadiah Uluputty, menyalurkan bantuan hewan kurban. Bantuan berupa 6 (enam) ekor sapi tersebut disalurkan olehnya di enam lokasi berbeda pada tiga kabupaten/kota di Maluku.

Saadiah menyebut, penyebaran dan penyaluran bantuan ini selain untuk mengisi kegiatan reses, juga merupakan komitmennya untuk senantiasa membantu masyarakat di dapilnya.

"Alhamdulillah dapat diberi kemudahan untuk menyalurkan 6 ekor sapi hewan kurban pada idul kurban tahun ini", kata Saadiah.

Hewan kurban tersebut diserahkan Saadiah secara simbolis di Galunggung Desa Batu Merah Kota Ambon pada Jumat (30/7/2020).

Lokasi sebaran di Kota Ambon, selain di Galunggung, juga di Mesjid Alanshar Poka. Waktu sebelumnya, hewan kurban telah diserahkan di Negeri Lima Kecamatan Leihitu, Tanah Merah Desa Liang Kecamatan Saluhutu Kabupaten Maluku Tengah dan Dusun Liaela Desa Luhu Kabupaten Seram Bagian Barat.

Dirinya mengakui jika hewan kurban yang diberikannya tidak sebanding dengan banyak permintaan di berbagai lokasi di Maluku.

"Kami belum dapat memenuhi semuanya, karena jumlahnya terbatas. Semoga Idul Kurban tahun depan jumlah yang disalurkan lebih meningkat", tandas politisi PKS ini.

Kata Saadiah, dampak pandemic covid-19 ikut memukul ekonomi masyarakat Maluku. Maka penyaluran hewan kurban yang dilakukan oleh banyak komponen selain menjalankan kewajiban bagi kalangan muslim yang mampu tapi sekaligus mewujudkan empati dan peduli bagi masyarakat.

"Banyak kalangan yang ikut menyalurkan hewan kurban. Momentum Idul kurban sangat baik. Daging kurban dapat disalurkan pada penerima dari kelompok miskin dan rentan secara ekonomi. Ini cara kita berempati", sebut Saadiah.

Baginya, kesadaran berkurban yang dilakukan perorangan maupun berkelomppok juga sebagai manifestasi ungkapan syukur atas karunia dan pemberian nikmat yang dirasakan.

"Yang memiliki kemampuan berkurban tentu diberi karunia lebih. Maka ungkapan kesyukuran tersebut sejatinya ditunjukan. Berkurban pada momen Idul Adha adalah salah satu wujudnya", sebut Anggota Komisi VII ini.

Wakil Ketua Fraksi PKS Tebar 54 Hewan Qurban Se Tangerang Raya

Ya ini program tahunan sebagai pribadi, kader dan anggota legislatif dari PKS untuk berkurban, berbagi dan terus melayani ummat. Apalagi pada kondisi mutakhir, masyarakat tengah menderita musibah covid-19,"

Dr. H. MULYANTO, M.Eng
Anggota Komisi VII DPR RI

BERKURBAN BERBAGI DAN TERUS MELAYANI
SELAMAT IDUL ADHA 1441 H

Kabupaten Tangerang (02/08) - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Dr. Mulyanto menebar 54 hewan qurban ke wilayah Tangerang Raya dalam momen lebaran qurban atau Hari Raya Idul Adha 1441 H.

"Ya ini program tahunan sebagai pribadi, kader dan anggota legislatif dari PKS untuk berkurban, berbagi dan terus melayani ummat. Apalagi pada kondisi mutakhir, masyarakat tengah menderita musibah covid-19," kata Mulyanto disela-sela pemotongan hewan qurban di kediamannya Tangerang Selatan, Jum'at (31/7/2020).

54 hewan qurban tersebut terdiri dari 3 ekor sapi dan 51 ekor kambing. Hewan qurban tersebut dipotong dan dibagikan dagingnya kepada masyarakat melalui Dewan Pengurus Daerah (DPD) Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan dan Dewan Pengurus Cabang (DPC) se Tangerang Raya.

"Untuk dibagikan dagingnya kepada masyarakat via DPP, DPW dan 49 DPC PKS se-Tangerang Raya. Semoga berkah," tutur Mulyanto.

Hermanto Sembelih Hewan Qurban di Padang

Dalam Qur'an surat Ibrahim ayat 7, Allah SWT berjanji akan menambah nikmat kepada hamba yang bersyukur. Jadi pada hakekatnya, berkurban itu untuk kepentingannya sendiri. Karena dengan berkurban maka kenikmatan yang diperolehnya akan terus bertambah

Dr. HERMANTO, S.E., M.M
Anggota Komisi IV DPR RI

BERKURBAN BERBAGI DAN TERUS MELAYANI
SELAMAT IDUL ADHA 1441 H

Padang (03/08) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Hermanto, dalam kunjungan kerjanya di daerah pemilihannya menyempatkan diri menyembelih sapi qurban di halaman Kantor DPW PKS Sumatera Barat di Padang.

"Berkurban dengan ikhlas, merupakan simbolisasi rasa syukur atas anugerah nikmat Allah yang tidak terhitung banyaknya," ucap Hermanto yang merupakan Anggota DPR Asal Dapil Sumbar 1 ini.

Dalam Qur'an surat Ibrahim ayat 7, lanjut Hermanto, Allah SWT berjanji akan menambah nikmat kepada hamba yang bersyukur.

"Jadi pada hakekatnya, berkurban itu untuk kepentingannya sendiri. Karena dengan berkurban maka kenikmatan yang diperolehnya akan terus bertambah", papar legislator dari Fraksi PKS ini.

"Karena itu bagi yang mampu, hendaknya berkurban", tambahnya.

Selain menyembelih sendiri hewan qurban, Hermanto juga menitipkan penyembelihan hewan qurban di 15 lokasi lainnya.

Ke-15 lokasi tersebut yaitu 6 lokasi di Padang, dua di Pariaman, masing-masing satu lokasi di Kabupaten Solok, Kota Solok, Sawahlunto, Sijunjung, Pesisir Selatan, Bogor dan Kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jakarta.

Hari Raya Idul Adha

Rakan Rafli Peduli Wareh Salurkan Sejumlah Hewan Qurban

BERKURBAN BERBAGI DAN TERUS MELAYANI
SELAMAT IDUL ADHA 1441 H

Banda Aceh (31/07) --- Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah sebagai momentum berqurban, berbagi dan terus melayani menjadi slogan perayaan hari besar umat islam yang jatuh pada 31 Juli 2020, dikalangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Pembagian hewan qurban dilakukan Anggota DPR RI Fraksi PKS asal Aceh, Rafli, pada perayaan hari raya Idul Adha kali ini ke berbagai ke tempat di Aceh, khususnya dalam daerah pemilihan (Dapil) 1 Aceh.

Hewan Qurban sudah disalurkan hingga ke desa-desa, dilakukan Relawan Rakan Rafli Peduli Wareh yang tersebar di berbagai kabupaten/ kota dalam Provinsi Aceh bersama Partai Keadilan Sejahtera, senilai total Rp. 200 Juta berlangsung sejak (29/07/2020).

"Alhamdulillah Tahun ini kita bisa kembali sediakan sejumlah hewan qurban untuk masyarakat dengan sedikit kemapuan yang Allah anugerahkan kepada kita," ujar Rafli dalam keterangan kepada media.

Momentum Hari Raya Qurban bagi Politisi yang sudah lebih dulu tenar dalam mengembangkan seni etnik kontemporer juga sebagai kesempatan men-stimuli energi dalam mengisi pembangunan negeri dengan semangat pengorbanan

"Hari Raya Qurban kita maknai sebagai momentum membersihkan diri dari sifat dan sikap yang kurang memanusiakan manusia, serta mengisi pembangunan negeri ini dengan semangat pengorbanan. Idul Adha mengingatkan kita untuk senantiasa ikhla," ungkap Rafli.

"Yakinlah, setiap pengorbanan Allah janjikan kejayaan" ucap Rafli menambahkan.

Senada itu Koodinator Penyerahan Hewan Qurban Rakan Rafli Peduli Wareh, Muhammad Qadafi mengaku bersyukur dengan terdistribusinya sejumlah hewan kurban.

"Alhamdulillah semua bantuan hewan qurban sudah selesai kita salurkan, bantuan hewan qurban senilai 200 juta disalurkan kebeberapa titik yang ada di Dapil I Aceh. kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kakanda Rafli Kande dan yang telah mempercayai kami untuk menyalurkan bantuan tersebut. semoga bantuan ini sangat berarti bagi masyarakat apalagi peringatan hari raya idul adha ini dilaksanakan ditengah pandemi covid 19. semoga ini menjadi ladang amal bagi kita semua," tutur Qadafi.

Rayakan Idul Adha

Habib Aboe Ajak Masyarakat Tingkatkan Kepekaan Sosial

Menyembelih hewan qurban adalah bentuk solidaritas sosial. Nilai ini sangat penting saat terjadi 'pagebluk' seperti saat ini. Saling berbagi dan saling menolong adalah nilai kunci ketahanan sosial di tengah masyarakat. Apalagi distribusi hewan qurban menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan gizi masyarakat dan daya tahan tubuh

HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI
Ketua MKD DPR RI

BERKURBAN BERBAGI DAN TERUS MELAYANI
SELAMAT IDUL ADHA 1441 H

Jakarta (31/07) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Aboebakar Al-Habsy mengucapkan Selamat Idul Adha 1441 H kepada Kaum Muslimin, Jumat (31/7).

Menurut pria yang akrab disapa Habib Aboe ini, merayakan Idul Adha di saat pandemi memberikan banyak hikmah untuk semua manusia.

Hal ini, lanjut Habib Aboe, berhubungan dengan sejarah Islam yang terkait Ibadah Haji dan kewajiban menyembelih hewan qurban.

"Pertama, kita dapat meneladani ketabahan Nabi Ibrahim. Beliau dengan tabah menjalankan perintah Allah untuk mengurbankan anak semata wayangnya Ismail," ungkap Anggota Komisi III DPR RI ini.

Sikap tabah atas ujian seperti ini, kata Habib Aboe, sangat diperlukan disaat kita mengalami wabah Cocid-19.

"Ketabahan menghadapi pandemi akan menjadi kunci kemampuan psikologis kita dalam menghadapi cobaan hidup," tuturnya.

Kedua, imbuh Bendahara Fraksi PKS ini, adalah keyakinan terhadap pertolongan Allah yang dicontohkan Siti Hajar.

"Saat Siti Hajar bersa'i antara bukit Sofa dan Marwa untuk mencari air tanpa putus asa adalah pelajaran untuk kita semua. Saat menghadapi masa sulit disaat pandemi seperti saat ini kita tidak boleh berputus asa. Kita harus yakin bahwa Allah SWT pasti akan memberikan pertolongan," terang Habib Aboe.

Ketiga, katanya, menyembelih hewan qurban adalah bentuk solidaritas sosial.

"Nilai ini sangat penting saat terjadi 'pagebluk' seperti saat ini. Saling berbagi dan saling menolong adalah nilai kunci ketahanan sosial di tengah masyarakat. Apalagi distribusi hewan qurban menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan gizi masyarakat dan daya tahan tubuh," tutup Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan ini.

BERKURBAN
BERBAGI DAN
TERUS MELAYANI
SELAMAT IDUL ADHA 1441 H

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

HIKMAH

Merayakan Idul Adha Di Saat Pandemi Covid-19

1. **Meneladani ketabahan Nabi Ibrahim.** Beliau dengan tabah menjalankan perintah Allah untuk mengurbankan anak semata wayangnya Ismail. Sikap tabah atas ujian seperti ini, sangat diperlukan disaat kita mengalami wabah Covid-19.

2. **Keyakinan terhadap pertolongan Allah.** Saat Siti Hajar bersa'i antara bukit Sofa dan Marwa untuk mencari air tanpa putus asa adalah pelajaran untuk kita semua. Saat menghadapi masa sulit disaat pandemi seperti saat ini kita tidak boleh berputus asa. Kita harus yakin bahwa Allah SWT pasti akan memberikan pertolongan

3. **Menyembelih hewan qurban adalah bentuk solidaritas sosial.** Nilai ini sangat penting saat terjadi 'pagebluk' seperti saat ini. Saling berbagi dan saling menolong adalah nilai kunci ketahanan sosial di tengah masyarakat. Apalagi distribusi hewan qurban menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan gizi masyarakat dan daya tahan

HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI
Ketua MKD DPR RI

Merayakan Idul Adha di saat pandemi memberikan banyak hikmah untuk semua manusia. Hal ini, berhubungan dengan sejarah Islam yang terkait Ibadah Haji dan kewajiban menyembelih hewan qurban.

Dimyati Natakusumah:

Kita Harus Syukuri Nikmat Qurban

Saya mengajak terus tingkatkan silaturahmi dengan rakyat demi kemajuan PKS untuk mewujudan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. dan Kita harus syukur nikmat dan terus berkurban setiap menghadapi Idul Kurban,

DR. H. R. A. DIMYATI NATAKUSUMAH, SH, MH
Anggota Komisi III DPR RI

BERKURBAN BERBAGI DAN TERUS MELAYANI
SELAMAT IDUL ADHA 1441 H

Pandeglang (31/07) --- Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, H. Achmad Dimyati Natakusumah mengklaim Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah partai besar dan juga oposisi murni yang membela kepentingan umat.

Selain itu, PKS tetap menjadi partai yang melakukan check and balance yang positif terhadap arah kebijakan pemerintah baik pusat, provinsi maupun daerah.

"Ya, di Pandeglang dan Lebak PKS sebagai partai terbesar dan saya adalah satu-satunya kader PKS yang baru hijrah dan telah membuktikan kemenangan pada pileg kemarin. Saya mengajak terus tingkatkan silaturahmi dengan rakyat demi kemajuan PKS untuk mewujudan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat," kata Dimyati Natakusumah saat melaksanakan reses di DPD PKS Pandeglang sekaligus agenda kurban sebanyak 5 ekor sapi untuk disembelih di Hari Idul adha, Kamis (30/7).

Dimyati mengajak para pengurus, anggota dan kader PKS untuk sama-sama bersyukur, karena di tengah pandemi Covid-19, masih mampu melaksanakan kurban sebanyak 5 ekor sapi.

"Kita harus syukur nikmat dan terus berkurban setiap menghadapi Idul Kurban," kata Dimyati.

Sementara Ketua DPD PKS Pandeglang, Asep Rafiudin mengatakan, melaksanakan kegiatan kurban merupakan amalan paling besar seperti yang telah dicontohkan Nabi Ibrahim SAW. Bahkan Siti Aisyah juga pernah menyebut amalan paling besar dalam hidup ini adalah berkurban di Hari Iduladha.

"Alhamdulillah, lebaran Iduladha tahun ini kita bisa berkurban 5 ekor sapi untuk dibagikan kepada masyarakat," ujarnya.

Adang Daradjatun
Anggota DPR RI
Alhamdulillah... masih tersimpan dengan baik file perjalanan Haji. 40 Tahun yang lalu .
Fraksi PKS DPR RI dan 200 lainnya
50 Komentar
Sunmanjaya Rukmandis Bila berdasarkan tahun Hijriah, 1400-1441= 41 tahun yg lalu. Tapi, koq lebih tampan dan gagah sekarang ya?!
Nurma Amsir Maasya Allah, 40 tahun lalu.. ayah saya 47 tahun lalu... katanya masih pakai kapal laut.. barokalalah pak Adang...
Tony Try Bila Sy belum lahir.... bapak udah berangkat Haji....mantapppp euy....
Tri Aji Ardian Barakallahufikum Pak Pembina,, sukses terus dan sehat selalu dunia dan akhirat
REPUBLIK INDONESIA
PAS PERJALANAN HAJI
(P.P.H.)
REPUBLIK INDONESIA
PAS PERJALANAN HAJI
(P.P.H.)
TAHUN

Rayakan Idul Adha

Aleg PKS Ajak Masyarakat Perhatikan Protokol Kesehatan

BERKURBAN BERBAGI DAN TERUS MELAYANI
SELAMAT IDUL ADHA 1441 H

Tasikmalaya (30/07) --- Tahun ini sungguh istimewa bagi umat muslim di Indonesia atau bahkan di seluruh dunia, karena dua hari raya besar umat Islam harus dilewati dalam masa pandemi.

"Sejak awal tahun 2020 bangsa Indonesia diuji dengan Pandemi Covid 19 yang merubah tatanan hidup bangsa ini", ungkap Toriq Hidayat.

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS ini disela-sela kegiatan reses di dapilnya mengatakan bahwa ujian ini harus disikapi dengan positif.

"Walau pada tahun ini pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tidak mengirim calon jemaah haji dengan alasan keselamatan. namun untuk syariat berkurban bagi orang muslim yang mampu maka masih bisa dilaksanakan", jelasnya.

Jumlah kasus Covid 19 belakangan ini terus meningkat. Kota-kota besar di wilayah Indonesia berstatus zona merah atau zona kuning. Bahkan yang tadinya berstatus zona hijau kini kembali masuk zona merah

Karenanya untuk pelaksanaan ibadah sholat Ied dan penyembelihan hewan kurban tahun ini maka perlu memperhatikan beberapa hal. Agar perayaan umat islam ini terhindar dari penyebaran virus.

"Upaya yang perlu dilakukan adalah mengetahui status pandemi di lingkungan kita. Yakni dengan berkomunikasi dan mengikuti himbauan pemerintah daerah setempat. Misalnya apakah boleh dilaksanakan sholat Ied berjamaah dengan massa yang banyak atau tidak, apakah penyembelihan hewan kurban dapat dilakukan di lingkungan kita atau tidak. Tidak kalah penting adalah cara pembagian daging kurban agar tidak menimbulkan kerumunan," jelas Toriq.

Kemudian Anggota Komisi I ini menambahkan, apabila hasil komunikasi dimungkinkan melaksanakan ibadah sholat Ied secara berjamaah dan penyembelihan hewan kurban dapat dilakukan di lingkungan setempat, maka masyarakat harus melaksanakannya dengan protokol kesehatan yang ketat.

Selanjutnya Toriq mengajak untuk meneladani kisah Nabi Ibrohim dan anaknya, Nabi Ismail. Teladan penting yang dapat diambil yakni seorang muslim hendaknya memiliki loyalitas yang benar. Berikutnya memiliki orientasi hidup yang benar.

"Kemudian selalu merespon spontan atas segala perintah Alloh SWT. Dan terakhir memiliki ketaatan yang sempurna", tegasnya.

Semoga pada momen Idul Adha kali ini, kita dapat menguatkan ketaatan kepada Allah SWT ujar Toriq menambahkan. Kita bangun kepedulian sosial terhadap saudara-saudara kita yang terdampak pandemi, berkurban dan berbagi kepada sesama.

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Rencana Pemerintah
Bangun Pusat Data Nasional
dengan Dana Asing

PATUT DIPERTANYAKAN

Di sini ada data center milik BUMN. Telkom membangun data center besar di Bekasi. Sepertinya aneh, kenapa kok pemerintah justeru membangun data center sendiri dengan campur tangan asing ya. Kita sepertinya menghadapi era industri 4.0 dengan setengah-setengah. Skema pendanaan dari asing ini buktinya, urusan yang sangat vital pun kita tidak berusaha untuk berdikari. Ini yang perlu kita perjelas, agar kedaulatan kita sekarang dan akan datang tetap terjaga secara utuh

H. Sukamta, Ph.D
Anggota Komisi I DPR RI

Rencana Pemerintah Bangun Pusat Data Nasional dengan Dana Asing Dipertanyakan

Kita sepertinya menghadapi era industri 4.0 dengan setengah-setengah. Skema pendanaan dari asing ini buktinya, urusan yang sangat vital pun kita tidak berusaha untuk berdikari. Ini yang perlu kita perjelas, agar kedaulatan kita sekarang dan akan datang tetap terjaga secara utuh

H. SUKAMTA, Ph.D
Anggota Komisi I DPR RI

Yogyakarta (30/07) --- Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika mendorong pemercepatan pembiayaan Perancis untuk pembangunan Pusat Data Nasional di Indonesia.

Sukamta, Anggota Komisi I DPR RI, Kamis (30/07/2020) di Jakarta menyatakan, "Mengapa untuk bangun data center, yang merupakan infrastrukfur vital pemerintah, harus dengan dana asing? Semua data pemerintah akan ada dalam pusat data tersebut. Wajar timbul kekhawatiran apabila ada campur tangan asing di situ. Potensi penambangan data oleh asing menjadi semakin terbuka. Saya ingatkan pemerintah tentang kedaulatan data. Jangan sampai kedaulatan data kita tergadaikan nantinya."

Wakil Ketua Fraksi PKS ini menekankan perlu diperjelas skema kerjasama ini seperti apa. Apakah mereka ikut dalam spesifikasi teknis dan implementasinya ? Jika ya, tentu ini sangat mengkhawatirkan.

Sukamta juga menambahkan bahwa banyak pemain lokal yang kompeten. Di Indonesia sudah banyak pemain data center yang diakui global. Bahkan ada cloud computing provider global yang 'numpang' di data center lokal kita. Kita harus bisa mandiri. Bibit-bibit yang kompeten harus kita dukung. Jangan justeru kita membesarkan kepentingan asing.

"Di sini ada data center milik BUMN. Telkom membangun data center besar di Bekasi. Sepertinya aneh, kenapa kok pemerintah justeru membangun data center sendiri dengan campur tangan asing ya. Kita sepertinya menghadapi era industri 4.0 dengan setengah-setengah. Skema pendanaan dari asing ini buktinya, urusan yang sangat vital pun kita tidak berusaha untuk berdikari. Ini yang perlu kita perjelas, agar kedaulatan kita sekarang dan akan datang tetap terjaga secara utuh," harap wakil rakyat dari Daerah Istimewa Yogyakarta.

Aleg PKS : Duka mendalam bagi Korban Ledakan di Libanon, Indonesia Bersamamu

Saya sampaikan duka mendalam kepada seluruh korban ledakan dahsyat itu baik yang meninggal dunia maupun yang luka-luka, disaat pandemi seperti ini yang belum selesai, Rakyat Libanon harus merasakan musibah yang lain, semoga Allah SWT menguatkan Rakyat Libanon.

Dr. ABDUL KHARIS A, SE. M.Si.Akt
Wakil Ketua Komisi I DPR RI

Solo (05/08) --- Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Kharis Almasyhari menyampaikan duka mendalam atas ledakan hebat yang mengguncang Ibukota Lebanon, Beirut, Selasa (04/08/2020), yang menyebabkan setidaknya 73 orang meninggal dan lebih dari 3.000 lainnya luka-luka.

"Saya sampaikan duka mendalam kepada seluruh korban ledakan dahsyat itu baik yang meninggal dunia maupun yang luka-luka, disaat pandemi seperti ini yang belum selesai, Rakyat Libanon harus merasakan musibah yang lain, semoga Allah SWT menguatkan Rakyat Libanon" jelas Kharis dalam keterangan tertulis kepada Media, Rabu (05/08).

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS ini meminta kepada Kementerian Luar Negeri untuk segera mendata dan memastikan apakah ada korban WNI yang terdampak dalam ledakan tersebut dan segera memberikan pendampingan dan bantuan yang diperlukan.

"Berdasarkan data Kemenhan dan Kemenlu di Lebanon, terdapat 1.234 TNI anggota kontingen Garuda yang bertugas menjaga demarkasi perbatasan Libanon-Israel dan ratusan WNI yang bekerja disana, semoga semua tidak ada disekitar ledakan dan semoga sehat wal afiat" jelas Kharis.

Selain keselamatan WNI, Kharis juga mendorong Pemerintah Indonesia memberikan bantuan sebagai negara sahabat kepada Libanon atas terjadinya musibah tersebut serta mendorong agar dilakukan investigasi menyeluruh dan serius karena eskalasi ledakan yang begitu besar.

"Kemarin Perdana Menteri Libanon Yang Mulia Hassan Diab mengatakan kepada media adanya 2.750 ton amonium nitrat - bahan untuk pupuk dan peledak yang disimpan di gudang yang mengakibatkan ledakan dahsyat itu, saya fikir dengan tetap menjunjung tinggi kedaulatan negara Libanon, Indonesia harus mendorong dilakukan investigasi menyeluruh, jelas dan terang sehingga dapat menjelaskan kepada masyarakat Libanon dan dunia," tutup Kharis.

Berbelasungkawa untuk Pemerintah dan Rakyat Lebanon

Ketua Fraksi PKS DPR Minta Kedubes RI Selamatkan WNI

Kita semua berdoa tidak ada WNI yang menjadi korban dan meminta Kementerian Luar Negeri melalui Kedutaan Besar kita untuk menyampaikan laporan dan informasi aktual menit per menit. Hal ini untuk memberikan ketenangan kepada keluarga WNI yang ada di Indonesia.

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI

Jakarta (05/08) --- Ledakan besar yang terjadi di Beirut Lebanon, Selasa, (04/08/2020), mendapat perhatian dari Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini.

Jazuli secara khusus menyampaikan belasungkawa dan duka cita mendalam kepada Pemerintah dan rakyat Lebanon atas tragedi yang masih dicari dan diinvestigasi penyebabnya ini.

Puluhan orang dikabarkan meninggal dunia dan ribuan lainnya luka-luka.

Anggota Komisi I DPR ini berharap Perwakilan RI di Lebanon segera mengambil langkah komunikasi dan pengumpulan informasi yang yang cepat dan akurat untuk mengetahui atau mengidentifikasi bilamana ada WNI yang menjadi korban dikarenakan di Lebanon selain WNI juga terdapat TNI Polri yang bertugas sebagai pasukan penjaga perdamaian.

"Kita semua berdoa tidak ada WNI yang menjadi korban dan meminta Kementerian Luar Negeri melalui Kedutaan Besar kita untuk menyampaikan laporan dan informasi aktual menit per menit. Hal ini untuk memberikan ketenangan kepada keluarga WNI yang ada di Indonesia," harapnya.

Selain itu Jazuli juga berharap Duta Besar dan jajarannya memprioritas keselamatan WNI, juga terpenuhinya pasokan kebutuhan sehari-hari, jika ledakan yang terjadi berdampak serius pada ekonomi dan pemenuhan kebutuhan. "Perlu langkah antisipasi yang terukur dan kerjasama berbagai pihak untuk perlindungan WNI kita", tuturnya.

"Investigasi yang mendalam dan menyeluruh diserahkan kepada Pemerintah Lebanon sehingga dapat mencari dan menemukan penyebab dari ledakan dahsyat layaknya bom atom tersebut," tutup Jazuli mengakhiri.

PARTAI KEADILAN
SEJAHTERA
PKS
DPR - RI
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
#PRAY
FOR
LEBANON
Turut berbela sungkawa yang mendalam kepada seluruh korban ledakan yang terjadi di Lebanon baik yang meninggal dunia maupun yang luka-luka. Disaat pandemi seperti ini yang belum selesai, Rakyat Libanon harus merasakan musibah yang lain, semoga Allah SWT menguatkan Rakyat Libanon
Fraksi PKS DPR RI
fraksipksdprri
@fpksdprri
fraksi.pks.id

RUU Cipta Kerja Bentuk Ketidakpercayaan Pemerintah Pusat terhadap Pemda

"Penghapusan kewenangan Pemda dalam penyelenggaraan tata ruang daerah dalam draft RUU cipta kerja akan membuat pengaturan, pembinaan, dan pengawasan penataaan ruang akan sulit dilakukan

Dr. KH SURAHMAN HIDAYAT, M.A.
Anggota Komisi II DPR RI

Jakarta (03/08) –– Anggota DPR RI Komisi II dari Fraksi PKS, Surahman Hidayat menilai, RUU Cipta Kerja merupakan bentuk ketidakpercayaan Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah.

"Jika kita cermati, ada asumsi Pemerintah Daerah menghambat investasi, hal ini tergambar dalam draft RUU cipta kerja yang mengusulkan revisi Undang Undang 26 tahun 2007 tentang penataan ruang dengan dihapusnya kewenangan pemda baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dalam penyelenggaraan tata ruang daerah dan penetapan target penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) selama 1 tahun, apabila tidak selesai maka akan ditetapkan oleh pemerintah pusat," papar Surahman.

Legislator FPKS dari dapil Jabar X ini menilai, lamanya pengesahan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) tidak semata disebabkan oleh Pemerintah Daerah tapi terkait pula dengan persetujuan subtansi dari Kementerian ATR/Kepala BPN dan pemetaan yang harus disahkan Badan Informasi Geospasial Indonesia.

"Lambatnya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sedikit banyak memang menganggu investasi karena di dalamnya terdapat zonasi-zonasi peruntukan. Namun, pembahasannya tetap harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian karena harus memperhatikan pemenuhan ruang terbuka hijau ataupun lahan pangan berkelanjutan," tegas Surahman.

urahman Hidayat mengingatkan Pemerintah Pusat agar bijak dalam percepatan investasi daerah. Investasi sangat dibutuhkan di daerah dengan catatan memperhatikan kepentingan ekonomi dan demografi daerah. Surahman tidak yakin ada Pemerintah Daerah yang dengan sengaja menghambat investasi.

"Penghapusan kewenangan Pemda dalam penyelenggaraan tata ruang daerah dalam draft RUU cipta kerja akan membuat pengaturan, pembinaan, dan pengawasan penataaan ruang akan sulit dilakukan," pungkas Surahman.

Kejagung Dinilai Anggota DPR Pasif Tangani Kasus Djoko Tjandra

Dulu waktu masa Pak Pras (HM Prasetyo) kan Samadikun (Hartono) seingat saya dulu dijemput. Makanya Pak Pras sendiri datang ke Halim, sekarang kenapa tidak

H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, M.Si
Anggota Komisi III DPR RI

Aceh (05/08) --- Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil mempertanyakan keseriusan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menangani kasus Djoko Tjandra. Padahal, Kejagung seharusnya merupakan lembaga yang aktif mengawasi Djoko Tjandra karena status Djoko sebagai terpidana kasus korupsi hak tagih Bank Bali.

Nasir menilai Kejagung terlihat pasif dalam penanganan Djoko Tjandra. Dia membandingkan dengan langkah Kejagung saat menangkap terpidana kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Samadikun Hartono.

"Dulu waktu masa Pak Pras (HM Prasetyo) kan Samadikun (Hartono) seingat saya dulu dijemput. Makanya Pak Pras sendiri datang ke Halim, sekarang kenapa tidak," ujar Nasir saat dihubungi wartawan, Selasa, 4 Agustus 2020.

Kejanggalan lainnya, kata Nasir Kejagung tidak pernah membahas soal Djoko Tjandra selama rapat dengat pendapat dengan DPR. Dia juga tidak mengetahui alasan Kejagung tidak melakukan hal tersebut.

"Kami tidak tahu juga kenapa. Apa ada komunikasi, apa tidak kita kan tidak tahu," ujarnya.

Nasir menduga ada berbagai penyebab Kejagung pasif dalam menangkap Djoko Tjandra. Meski tidak membeberkan secara rinci, dia mengatakan hal tersebut dapat digali dari Menkopolhukam Mahfud MD.

"Kita tidak tahu itu dilibatkan dari awal atau tidak, cuma memang betul (terkesan pasif). Dulu memang waktu Samadikun dijemput ada Pak Pras, saya juga bertanya seperti itu, sekarang kok tidak ada unsur jaksa," ujar Nasir.

Di sisi lain, Nasir mengakui bahwa polisi memiliki sumber daya dalam menindak pelaku tindak pidana. Sehingga, dia menduga kepolisian paling mobile dalam menangkap Djoko Tjandra.

"Jadi memang yang bisa mobile polisi, menurut saya bisa kita pahami kalau kemudian jaksa atau kejaksaan tidak aktif," ujarnya.

Mantan Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung, Chairul Imam dalam sebuah diskusi sebelumnya mengatakan Kejagung kecolongan dengan pelarian Djoko Tjandra.

Dia menilai salah satu aspek yang menyebabkan kecolongan itu lantaran lemahnya intelijen di kejaksaan.

Kejaksaan Agung seharusnya dapat terus memantau pergerakan Djoko Tjandra. Mulai dari keberadaan, termasuk memantau apakah yang bersangkutan berencana masuk ke Indonesia atau tidak. Sejak 2014 Kejaksaan Agung telah memiliki kesepakatan dengan Polri dengan pemanfaatan teknologi yang dinamai I-24/7.

Teknologi tersebut dapat melakukan pertukaran informasi selama 24 jam diantara 190 negara interpol, guna memonitor kejahatan internasional yang terjadi, terutama yang melibatkan Indonesia.

Chairul menyebut beberapa kali Kejagung berhasil membawa buronan dari luar negeri. Bahkan, dari negara-negara yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia.

"Tempat-tempat yang tidak punya perjanjian ekstradisi dengan kita, kita bisa berhasil. Jadi enggak tahu kok kenapa sekarang ini bisa begini, saya sendiri sudah lama di luar kejaksaan," tuturnya

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Ini Harapan Mantan Wakapolri Atas Penangkapan Djoko Tjandra

Apabila proses pelaksanaan penghukuman berjalan, apakah ada keistimewaan yang diperoleh selama berada di LP. Kita sudah sama-sama mengetahui tentang apa yang terjadi selama ini di dalam LP bagi orang orang tertentu. Mari kita kawal penegakan hukum di Indonesia, karena sesuai Pasal 1 (3) UUD 1945, Negara kita adalah negara hukum, semua sama orang sama kedudukannya di muka hukum

Drs. H. ADANG DARADJATUN
Anggota Komisi III DPR RI

Jakarta (31/07) --- Peristiwa penangkapan Djoko Sugiarto Tjandra menyita perhatian banyak pihak. Tak terkecuali Anggota Komisi III DPR, Komjen Pol (Purn) Adang Daradjatun.

"Walaupun Djoko Tjandra sudah tertangkap, tetapi kejadian masuknya Djoko Tjandra ke Indonesia beberapa waktu yang lalu dan sangat mencoreng wajah penegakan hukum di Indonesia jangan menjadi hilang," ujar Adang Daradjatun kepada SINDOnews, Jumat (31/7/2020).

Menurut dia, peristiwa Djoko Tjandra keluar masuk Indonesia beberapa waktu lalu harus menjadi pemicu bagi para penegak hukum untuk bekerja dengan baik dan penuh tanggung jawab. "Terutama tanggung jawab moral atau etika dan membongkar apa yang sebenarnya terjadi," kata mantan Wakil Kepala Polri (Wakapolri) ini.

Dia mengatakan, dengan tertangkapnya Djoko Tjandra, apa yang sebenarnya terjadi akan terungkap. "Polri harus mampu menggali semua persoalan atau kejadian yang lalu. Misalnya mengapa menjelang putusan MA, Djoko Tjandra bisa tahu dan lari ke luar negeri," kata Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Kemudian, dia melanjutkan, mengapa Djoko Tjandra dengan mudah mendapatkan paspor baru dari Kantor Imigrasi Jakarta Utara. "Banyak lagi hal-hal yang harus dilakukan Polri, bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya, apabila ingin kepercayaan rakyat terhadap penegakan hukum di Indonesia semakin baik," paparnya.

Dia menambahkan masyarakat merasa bahwa selama ini hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Dengan Kasus tertangkapnya pria yng tersangkut kasus pengalihan hak tagih Bank Bali itu, kata dia, dapat memberi jawaban kepada masyarakat.

"Dan yang paling penting, apabila proses pelaksanaan penghukuman berjalan, apakah ada keistimewaan yang diperoleh selama berada di LP. Kita sudah sama-sama mengetahui tentang apa yang terjadi selama ini di dalam LP bagi orang orang tertentu. Mari kita kawal penegakan hukum di Indonesia, karena sesuai Pasal 1 (3) UUD 1945, Negara kita adalah negara hukum, semua sama orang sama kedudukannya di muka hukum," pungkasnya

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Pemerintah Diminta
Turun Tangan

Serap Garam Milik Petani

Banyak yang harus diperbaiki di lapangan terkait garam ini mulai tidak terserapnya garam rakyat hingga garam impor yang seharusnya untuk industri diperdagangkan untuk konsumsi. Meski pemerintah belum mengizinkan impor, tapi di lapangan sudah tampak jelas, bahwa garam impor marak. Pemusnahan 2,5 ton garam himalaya tanpa Standar Nasional Indonesia (SNI) ini baru yang kelihatan. yang tidak kelihatan lebih banyak

Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P.,M.M.
Anggota Komisi IV DPR RI

Foto : dor.go.id image : istimewa:

Maraknya Impor

Andi Akmal Dorong Pemerintah Turun Tangan Serap Garam Milik Petani

Meski pemerintah belum mengizinkan impor, tapi di lapangan sudah tampak jelas, bahwa garam impor marak. Pemusnahan 2,5 ton garam himalaya tanpa Standar Nasional Indonesia (SNI) ini baru yang kelihatan. yang tidak kelihatan lebih banyak

Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P.,M.M
Anggota Komisi IV DPR RI

Jakarta (04/08) --- Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin meminta pemerintah untuk memberikan perhatian pada petani garam yang mulai mengeluh garamnya tidak terserap.

Menurut Andi Akmal, banyak yang harus diperbaiki di lapangan terkait garam ini mulai tidak terserapnya garam rakyat hingga garam impor yang seharusnya untuk industri diperdagangkan untuk konsumsi.

"Meski pemerintah belum mengizinkan impor, tapi di lapangan sudah tampak jelas, bahwa garam impor marak. Pemusnahan 2,5 ton garam himalaya tanpa Standar Nasional Indonesia (SNI) ini baru yang kelihatan. yang tidak kelihatan lebih banyak", tukas Akmal.

Akmal sangat menyesalkan kini di Jawa Timur masih ada stok garam ratusan ton, tapi aktivitas impor masih jalan. Bahkan 400 ton garam rakyat di satu propinsi yang belum terserap mesti mendapat perhatian dan solusi dari pemerintah baik pusat maupun daerah.

Legislator PKS ini mengkritisi bahwa tidak terserapnya garam rakyat itu disebabkan stok impor garam masih banyak.

"Padahal pemerintah belum pernah menerbitkan izin impor garam tertentu yang marak di pasar dan sebagian telah dimusnahkan. Salah satunya garam himalaya untuk konsumsi," pungkasnya.

Akmal di komisi IV dari sejak 5 tahun lalu, selalu mengingatkan kepada pemerintah untuk membangun sistem produksi garam yang berkualitas. Bahan baku yang melimpah di Indonesia merupakan potensi besar untuk mengembangkan garam dengan kualitas industri maupun konsumsi.

"Saat ini, para pengusaha makanan minuman (mamin) memilih membeli garam impor karena kualitasnya lebih bagus dan harganya lebih murah", terang Akmal.

Politisi asal Sulawesi selatan II ini merujuk neraca garam nasional, bahwa kebutuhan garam nasional tahun 2019 sekitar 4,2 juta ton. Jumlah tersebut terdiri atas kebutuhan industri sebesar 3,5 juta ton, konsumsi rumah tangga 320.000 ton, komersial 350.000 ton, serta peternakan dan perkebunan 30.000 ton.

Untuk Kebutuhan di 2020, Akmal memperkirakan tidak begitu jauh bahkan akan ada peningkatan pada masa pandemi ini karena usaha makanan minuman dalam kemasan meningkat.

"Saya berharap, kedepannya pemerintah mampu menciptakan sektor produksi garam yang memenuhi kebutuhan Nasional. Mengambil (menyerap) garam rakyat akan menjadi mudah ketika sistem industri garam kita sudah maju. Bukan saja memenuhi kebutuhan nasional, potensi Ekspor garam juga menjadi besar dan ini bila tidak menjadi perhatian khusus, sampe berpuluh tahun kedepan kita tidak akan ada kemajuan pada industri garam ini", tutup Andi Akmal Pasluddin.

Perubahan Mekanisme Amdal Pada RUU Cipta Kerja Perlu Dikaji Ulang

RUU Cipta Kerja ini kan regulasi besar yang nantinya akan dipakai dalam menjalankan berbagai urusan negara. Jangan sampai regulasi ini menjadi blunder bagi kemaslahatan rakyat banyak dan menguntungkan segelintir orang bahkan orang asing

H. JOHAN ROSIHAN, S.T
Anggota Komisi IV DPR RI

Sumbawa (05/08) --- Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan, mengkritisi usulan Pemerintah pada RUU Cipta Kerja berkaitan dengan mekanisme amdal yang membutuhkan waktu 2-3 tahun untuk rampung sehingga melalui usulan RUU Cipta Kerja beberapa ketentuan terkait Amdal ini diubah atau bahkan dihapus.

Dikatakannya, usulan ini terlalu mengada-ada karena persoalan Amdal yang bayak dijumpai saat ini adalah pada persoalan teknis dilapangan sehingga yang perlu diperbaiki hanya pada metode pelaksanaan dan pengawasaannya saja.

"RUU Cipta Kerja ini kan regulasi besar yang nantinya akan dipakai dalam menjalankan berbagai urusan negara. Jangan sampai regulasi ini menjadi blunder bagi kemaslahatan rakyat banyak dan menguntungkan segelintir orang bahkan orang asing", kritis Johan.

Politisi PKS ini mengatakan, persoalan mekanisme Amdal ini tidak perlu sampai merubah beberapa ketentuan tentang amdal dalam UU 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Johan bersama team kecil di fraksinya pada pengawalan pembahasan RUU Cipta Kerja, telah menganalisis tentang draft RUU Ciker banyak menghapus kewenangan Pemda.

"Penghapusan peran Pemda justru akan menyulitkan proses pengawasan tentang perlindungan lingkungan," tegas Johan.

Legislator asal Sumbawa ini secara tegas meminta kepada Pemerintah untuk mengkaji lebih dalam perubahan definisi Amdal dalam RUU cipta Kerja versi pemerintah yang mengubah ketentuan terkait Amdal adalah bagian dari proses perencanaan menjadi hanya sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Johan berargumen, bahwa hasil kajiannya bersama Fraksi PKS untuk Amdal mesti dikembalikan definisinya ke UU existing, karena hakikatnya perlindungan lingkungan adalah bagian dari perencanaan yang harus dilakukan oleh pemrakarsa kegiatan dan atau investor sebagai bagian dari komitmen.

Johan menegaskan, sangat tidak tepat bila Amdal hanya dijadikan sebagai bahan pertimbangan saja, karna akan banyak terjadi persoalan-persoalan yang tidak dapat diprediksi.

"Bila pemerintah ngotot dengan terminologi Amdal ini, kami memprediksi kedepannya akan ada dorongan praktik-praktik eksploitatif yang tidak memperhatikan lagi mengenai perlindungan lingkungan", ungkap Johan.

Politisi NTB ini menambahkan, pada persoalan Amdal di RUU Cipta Kerja juga menyoroti penghapusan ketentuan mengenai komisi penilai amdal yang akan digantikan dengan tim uji dokumen amdal yang ditentukan oleh pemerintah pusat.

"Sebab Komisi Penilai Amdal (KPA) merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan dalam proses penyusunan Amdal," terangnya.

Johan membeberkan, Minimal ada dua sudut pandang berkaitan dengan dokumen Amdal yaitu kejelasan (Rill) dan keterwakilan atau Representatif.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Legislator PKS Sebut RUU Cipta Kerja Berpotensi Lemahkan Pertanian Dalam Negeri

Salah satunya dalam UU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, yakni diubahnya ketentuan terkait pelaku usaha wajib mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dalam negeri, menjadi pelaku usaha di bidang hortikultura dapat memanfaatkan sumber daya manusia dalam negeri dan luar negeri (Vide Pasal 15 UU 13 tahun 2010

drh. H. SLAMET
Anggota Komisi IV DPR RI

Jakarta (30/07) --- Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Slamet kembali menyoroti RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law.

Legislator asal Sukabumi tersebut kali ini mengulas muatan RUU Cipta Kerja di sektor pertanian, terutama tentang regulasi impor.

Slamet menyebut, RUU Cipta Kerja berpotensi melemahkan pertanian Dalam Negeri di masa mendatang.

"Salah satunya dalam UU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, yakni diubahnya ketentuan terkait pelaku usaha wajib mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dalam negeri, menjadi pelaku usaha di bidang hortikultura dapat memanfaatkan sumber daya manusia dalam negeri dan luar negeri (Vide Pasal 15 UU 13 tahun 2010)," kata Slamet kepada awak media, Rabu (29/07/2020)

"Implikasinya, aturan tersebut berpotensi menjadi pintu masuk bagi Tenaga Kerja Asing (TKA), khususnya bidang pertanian hortikultura, yang akan berdampak tersisihnya tenaga kerja lokal. Terlebih lagi jika investornya berasal dari luar negeri," tambah Slamet.

Selain itu, sambung Slamet, muatan RUU Cipta Kerja lainnya yang juga berpotensi melemahkan pertanian dalam negeri adalah diubahnya ketentuan terkait usaha hortikultura yang dilaksanakan dengan mengutamakan penggunaan sarana hortikultura dalam negeri, menjadi penggunaan sarana hortikultura yang berasal dari dalam negeri dan/atau luar negeri (Vide Pasal 33 UU 13 Tahun 2010).

"Implikasinya, berpotensi membuka keran impor sarana pertanian (benih, pupuk, pestisida, dan lain-lain) secara ugal-ugalan tanpa memperhatikan kondisi dalam negeri. Pola impor seperti ini akan mendorong negara menjadi sangat tergantung kepada asing," tegas Slamet.

Terakhir, Slamet juga mengungkapkan soal diubahnya ketentuan terkait usaha hortikultura yang wajib memiliki perizinan berusaha dari pemerintah pusat.

Padahal, sebelumnya perizinan usaha tersebut dikeluarkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya (Vide Pasal 52 UU 13 Tahun 2010).

"Implikasinya, mereduksi peran dan kewenangan pemerintah daerah terkait perizinan. Pola seperti ini berpotensi merusak tatanan bernegara di era reformasi, yang salah satu semangatnya adalah otonomi daerah yang tertuang dalam UUD NRI 1945 amendemen ke-4 Pasal 18," pungkasnya.

RUU Cipta Kerja Harusnya Memuat Ketentuan Minimum Kebun Rakyat

“Indonesia merupakan negara bangsa agraris, yang artinya salah satu prioritas dalam menstabilkan ekonomi bangsa kita adalah pada pengelolaan lahan dan kebun. Ini sangat penting untuk menjadi perhatian kita semua. Bila kita gagal mengelola lahan dan kebun maka kita dapat gagal menjadi sebuah bangsa”,

Drs. HAMID NOOR YASIN, M.M.
Anggota Komisi IV DPR RI

Jakarta, (4/08/2020) – Anggota DPR RI Komisi IV dari Fraksi PKS, Hamid Noor Yasin angkat bicara pada RUU Cipta Kerja, yang masih terus dalam proses pembahasan.

"Mumpung masih dibahas, jadi perlu ada masukan-masukan termasuk pada persoalan perkebunan rakyat", ujar Hamid.

Seperti diketahui, bahwa saat ini, Dewan Perwakilan Rakyat masih melakukan pembahasan Rancangan Undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law Cipta Kerja. Hamid Noor Yasin Anggota memberikan perhatian khusus pada dihapusnya pasal 16 Undang-undang Perkebunan dalam RUU Cipta Kerja.

Hamid menegaskan, agar tanah hak usaha tidak ditelantarkan, ketentuan mengenai kewajiban mengusahakan kebun sebanyak 30% dalam 3 tahun dan 100% dalam 6 tahun harus tetap ada.

Anggota Fraksi PKS dapil Jawa Tengah ini berpendapat bahwa Pasal 16 pada Undang-undang No. 39 tahun 2014 tidak perlu dilakukan revisi. Pada ketentuan Undang-undang ini sudah jelas dan tegas tertuang pada Ayat 1 mengatur tentang waktu pengusahaan kebun dan ayat 2 menegaskan hak negara mengambil alih lahan yang tidak diusahakan.

“Lahan bukan komoditas, melainkan memiliki fungsi sosial ekonomi bagi masyarakat. Oleh karena itu, penelantaran atas tanah merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan secara etik maupun ekonomi", tegas Hamid.

Politisi PKS ini menyarankan, dari pada membiarkan lahan menjadi terlantar, pemerintah perlu mengatur luasan kebun minimum bagi rakyat. Gagasan ini disampaikan agar regulasi kedepan tetap berpihak kepada rakyat.

Legislator asal Jawa Tengah IV ini mengatakan, kita mengetahui bersama bahwa mayoritas petani kita merupakan petani gurem atau petani dengan luas lahan dibawah 0,5 hektar.

Membiarkan lahan terlantar adalah tidak tepat, lebih baik petani dengan luas lahan kecil diberikan hak kelola. Agar hasil produksinya meningkat dan berdampak bagi kesejahteraan petani.

“Indonesia merupakan negara bangsa agraris, yang artinya salah satu prioritas dalam menstabilkan ekonomi bangsa kita adalah pada pengelolaan lahan dan kebun. Ini sangat penting untuk menjadi perhatian kita semua. Bila kita gagal mengelola lahan dan kebun maka kita dapat gagal menjadi sebuah bangsa”, demikian dikatakan Hamid Noor Yasin di temui wartawan di sela-sela acara panen raya padi organik di Jaten Karanganyar jawa tengah

PROSES TANAMAN PADI ORGANIK

1. Padi jenis lokal/non trasgenik.
2. Dibudidayakan tanpa pestisida.
3. Menggunakan pupuk organik/ tanpa pupuk kimia.
4. Pengairannya dengan menggunakan air yang tidak tercemar.
5. Berasnya diproses tanpa poles juga tanpa bahan pengawet.
6. Saat di masak beras organik terasa lebih pulen.
7. Nasi tidak cepat basi dan bertahan hingga 24 jam.
8. Keunggulan beras organik yang lain adalah memiliki kandungan nutrisi dan mineral yang tinggi, kandungan glukosa, karbohidrad dan proteinnya mudah terurai, sehingga aman dan sangat baik utk dikonsumsi. bagus juga untuk program diet, mencegah kangker, serangan jantung, asam urat, darah tinggi dan vertigo.

SJP Minta Revisi Materi UU Lalu Lintas Angkutan Jalan Ditarik dari Omnibus Law

Adanya penghapusan sistem pelelangan dalam usaha angkutan, perpindahan kewenangan daerah ke pusat dan lainnya. Mengingat sektor transportasi merupakan kebutuhan mendasar yang keempat setelah sandang, pangan dan papan, maka setiap perubahan ini memerlukan pendalaman secara intensif

H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T
Anggota Komisi V DPR RI

Jakarta (30/07) --- Pembahasan RUU Cipta Kerja berlangsung sangat cepat. Bahkan di masa reses pembahasan tetap berlangsung. Padahal menurut ketentuan Pasal 1 angka 13 Peraturan DPR No. 1 tahun 2020 tentang Tata Tertib disebutkan bahwa Masa Reses adalah masa DPR melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPR untuk melaksanakan kunjungan kerja.

Oleh sebab itu, Fraksi PKS menolak untuk mengikuti pembahasan RUU Cipta Kerja di masa reses ini karena tidak sesuai dengan Tata Tertib.

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Suryadi Jaya Purnama menyampaikan cepatnya pembahasan ini menyebabkan masyarakat menduga-duga adanya kepentingan yang bermain di belakang RUU Cipta Kerja ini.

Seperti diketahui RUU Cipta Kerja akan mengubah 78 UU termasuk UU yang sedang dibahas pada Prolegnas 2020-2024 dan Prioritas 2020, di mana UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) termasuk yang akan diubah dan masuk dalam Prioritas 2020. Di akhir Masa Sidang IV 2019-2020 bahkan telah diputuskan bahwa Baleg menarik revisi UU Jalan pada prioritas 2020 untuk fokus dan mempercepat pembahasan UU LLAJ.

"Oleh sebab itu, pembahasan RUU Cipta Kerja terkait perubahan UU No. 22 tahun 2009 berpotensi bertabrakan dengan pembahasan revisi UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ di Komisi V DPR RI", ungkap Suryadi.

Beberapa hal yang akan diubah dalam UU No. 22 tahun 2009 tentang LLAJ pada RUU Cipta Kerja di antaranya pelibatan pihak ketiga dalam layanan publik di bidang lalu lintas yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah.

"Adanya penghapusan sistem pelelangan dalam usaha angkutan, perpindahan kewenangan daerah ke pusat dan lainnya. Mengingat sektor transportasi merupakan kebutuhan mendasar yang keempat setelah sandang, pangan dan papan, maka setiap perubahan ini memerlukan pendalaman secara intensif", tambahnya.

Sementara ini Komisi V DPR RI masih terus melakukan diskusi bersama pakar untuk mematangkan konsep revisi UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ ini.

"Fraksi PKS meminta pemerintah menarik revisi UU No. 22 tahun 2009 tentang LLAJ dari RUU Cipta Kerja dan mengembalikan pembahasan revisi UU No. 22 tahun 2009 tentang LLAJ ini kepada Komisi V DPR RI yang memang secara khusus membidangi masalah transportasi", ujar Suryadi.

Penghapusan Perijinan LCC Dalam Omnibus Law

Aleg PKS: Berbahaya bagi Keselamatan Penerbangan

Dalam RUU Cipker pemerintah mengusulkan penghapusan perijinan LCC. Kami khawatir hal ini akan membahayakan keselamatan penerbangan karena maskapai bisa beroperasi tanpa perlu mengurus perijinan. Hal ini berpotensi tidak adanya pengawasan dan evaluasi periodik oleh Kemenhub sebagai regulator

Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO
Anggota Komisi V DPR RI

Surabaya (04/08) --- RUU Omnibus Law Cipta Kerja (Cipker) akan menghapus perijinan maskapai bertarif rendah atau Low Cost Carrier (LCC). Kebijakan ini dikhawatirkan akan membahayakan keselamatan penerbangan.

"Dalam RUU Cipker pemerintah mengusulkan penghapusan perijinan LCC. Kami khawatir hal ini akan membahayakan keselamatan penerbangan karena maskapai bisa beroperasi tanpa perlu mengurus perijinan. Hal ini berpotensi tidak adanya pengawasan dan evaluasi periodik oleh Kemenhub sebagai regulator" Kata Sigit Sosiantomo, Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS).

Dalam RUU Omnibus Law Cipker, Pemerintah mengusulkan penghapusan pasal 99 UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Pasal 99 ini mengatur tentang kewajiban maskapai bertarif rendah untuk mengajukan perijinan. Dan ijin akan diberikan setelah maskapai memenuhi semua syarat yang ditetapkan dalam UU Penerbangan, khususnya dalam aspek keselamatan dan keamanan penerbangan.

"Kami mendukung keberadaan maskapai bertarif rendah karena sangat membantu pergerakan penumpang dan distribusi barang. Tapi, bukan berarti kita harus melonggarkan pengawasan dan perijinannya. Pengawasan dari pemerintah sebagai regulator harus tetap ada guna menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan," kata Sigit.

Untuk itu, Sigit menolak penghapusan perijinan LCC dalam RUU Cipker. Menurutnya, LCC harus tetap diawasi ketat guna menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan.

"Kami menolak penghapusan pasal 99 UU Penerbangan dalam RUU Cipker. Pasal 99 harus tetap dipertahankan sebagai kontrol pemerintah terhadap maskapai bertarif rendah agar tetap memenuhi standar pelayanan minimal dan aspek keselamatan serta keamanan penerbangan. Dan harus ada evaluasi periodik untuk maskapai bertarif rendah sebagai mana diatur dalam pasal 99 UU Penerbangan," kata anggota Komisi V asal dapil Jatim I ini.

Konsep low cost carrier sendiri bukanlah hal baru. LCC pertama kali digunakan oleh maskapai penerbangan asal Amerika Serikat, Pacific Southwest Airlines yang kemudian diadopsi oleh Southwest Airlines, maskapai yang didirikan Rollin King, Lamar Muse dan Herber Kelleher pada 1967 yang berhasil merebut pangsa pasar maskapai- maskapai penerbangan yang sudah mapan pada saat itu.

Dari sana tren atau model bisnis maskapai low cost carrier mulai menyebar dan diadopsi oleh maskapai- maskapai penerbangan di Eropa dan negara lain, termasuk Indonesia.

Meski bertarif murah, LCC tetap harus memenuhi standar pelayanan mininum khususnya dalam aspek keselamatan dan keamanan penerbangan. Karena itu, pengawasan dan evaluasi secara periodik terhadap maskapai bertarif rendah harus diatur dalam UU guna menjamin keselamatan penerbangan tanah air.

DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA
17 Agustus 2020

LOMBA MEMBACA TEKS PROKLAMASI MIRIP SUARA BUNG KARNO

TOTAL HADIAH 12 JUTA RUPIAH

Persembahan
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia
Dalam Rangka
Menyambut HUT
Kemerdekaan RI Ke-75

Syarat dan Ketentuan:

1. Lomba ini terbuka bagi seluruh Warga Negara Indonesia dan tidak dipungut biaya apapun alias GRATIS. Lomba ini tidak berlaku bagi Keluarga Besar Fraksi PKS DPR RI.
2. Peserta diwajibkan untuk follow Instagram @fraksipksdprri, Twitter @FPKSDPRRI, Facebook Fan Page Fraksi PKS DPR RI.
3. Durasi video maksimal 3 menit.
4. Video dapat didaftarkan dengan cara:
5. Mengunggah (upload) video ke akun Youtube pribadi peserta dengan format judul: "Lomba Membaca Teks Proklamasi FPKS DPR RI - NAMA"
6. Mengirim url youtube tersebut ke No. WA 0852 2800 2986 atas Nama Yoandro.
7. Menyebarkan video yang telah diupload ke akun pribadi peserta instagram atau facebook atau twitter dengan tag ke akun instagram @fraksipksdprri, facebook @FraksiPKSDPRRI dan twitter @FPKSDPRRI dengan mencantumkan hashtag **#LombaMembacaTeksProklamasiFPKSDPRRI**
8. Upload ke IG Potongan Video dengan hastag **#LombaMembacaTeksProklamasiFPKS,**
9. Tag 5 teman terdekat Follow akun IG Fraksi PKS DPR RI
10. Keputusan Dewan Juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
11. Jika di kemudian hari ditemukan kecurangan atau pelanggaran terhadap salah satu peraturan atau syarat dan ketentuan lomba, panitia berhak membatalkan kemenangan pemenang yang sudah diumumkan. Pemenang yang dibatalkan wajib mengembalikan seluruh hadiah lomba dalam keadaan utuh seperti kondisi saat diterima.a

Periode Lomba

- Launching/Publikasi :
  Jum'at, 7 Agustus 2020
- Penerimaan Video Maksimal :
  Kamis 20 Agustus 2020 pukul 24.00 WIB
- Pengumuman Finalis via socmed :
  Senin 24 Agustus 2020

Aspek Penilaian

1. Kemiripan suara dengan Soekarno
2. Penjiwaan
3. Vokal / Artikulasi / Intonasi
4. Likers & Comment
5. Orisinalitas
6. Setting tempat

Hadiah

Juara 1	: Rp. 5.000.000,-
Juara 2	: Rp 3.500.000,-
Juara 3	: Rp 2.000.000,-
Juara Harapan 1	: Rp 1.000.000,-
Juara Harapan 2	: Rp 500.000,-

Nara Hubung

Yoandro
0852 2800 2986

Manfaatkan Reses

Nevi: Pelaku Usaha Mesti Beradaptasi dengan Covid-19 agar Produktif

Saya berharap, ke depannya pemerintah akan mengarahkan UMKM agar dapat masuk ke sektor-sektor strategis dan melihat potensi-potensi lainnya dan akan dibantu pemerintah mulai dari hulu hingga hilir

Hj. NEVI ZUAIRINA
Anggota Komisi VI DPR RI

Nevi Zuairina saat menerima Aspirasi pada 20 November 2019

Bukittinggi (31/07) --- Anggota DPR RI Komisi VI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina ketika melakukan Reses masa sidang IV Tahun Sidang 2019-2020, (29/07/2020), mengatakan bahwa tahun 2020 merupakan tantangan berat bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Menurut Nevi, Pandemi Covid-19 membuat UMKM terpukul keras pada berbagai sektor. Tetapi hal ini bukan menjadi halangan bagi para pegiat UMKM di Indonesia untuk terus berjuang di tengah situasi yang serba tidak pasti ini.

"Wabah ini sungguh telah membuat situasi serba tidak pasti. Tetapi kita harus kuat menghadapinya. Kondisi Covid-19 jangan kita ratapi dan sesali. Jadikan wabah ini sebagai ujian bagi kita. Bagaimanapun juga, kita dapat menyikapi dengan arif dan bijaksana sehingga mental kita tetap terjaga. Sesungguhnya, kekuatan itu di awali oleh kekuatan jiwa, dan kelemahan itu, muncul berawal dari lemahnya jiwa", kata istri Gubernur Sumatera Barat ini, saat memberikan pembekalan pada pelaku UMKM di Istana Bung Hatta, Rabu (29/7/2020).

Pertemuan diskusi yang mengusung tema 'UMKM, Tantangan dan Peluang Dalam Masa Pandemi Covid-19' yang digelar dalam rangka reses anggota DPR dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina bersama para pelaku UMKM di Sumbar.

Nevi Zuairina mengatakan, banyak UMKM sekarang dalam masa pandemi Covid-19 ini, masih ada yang tetap bertahan. Bahkan bisa lebih baik dari sebelumnya, karena bisa memanfaatkan keadaan dan kreatif dengan menggunakan inovasi melalui internet.

"Seperti ini yang kita harapkan, UMKM bisa mengambil kesempatan yang ada dibalik tantangan yang dihadapinya, dengan menggunakan jaringan internet," jelasnya.

Legislator PKS ini menjelaskan, bahwa situasi ekonomi yang didukung proses digital saat ini belum dapat mengimbangi prilaku ekonomi manual. Berbagai data menunjukkan, aktivitas digital belum mampu mendongkrak ekonomi secara nasional. Itu sebabnya pemerintah pusat secara tersirat mendorong situasi new normal pada kegiatan ekonomi dengan transaksi non digital seperti mulai dicabutnya PSBB.

Nevi Zuairina berpendapat, virus Corona tidak boleh menurunkan semangat pelaku UMKM di Sumbar untuk terus berkembang. Untuk itu, pemerintah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada UMKM, dengan bunga yang rendah.

Selain KUR, lanjut Nevi, PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM, juga hadir sebagai solusi peningkatan kesejahteraan melalui akses permodalan, pendampingan dan program peningkatan kapasitas para pelaku usaha.

"Saya berharap, ke depannya pemerintah akan mengarahkan UMKM agar dapat masuk ke sektor-sektor strategis dan melihat potensi-potensi lainnya dan akan dibantu oleh pemerintah mulai dari hulu hingga hilir. Bantuan pemerintah di sektor hilir, (pasca produksi dan pemasaran), menjadi sangat strategis terutama adaptasi transaksi digital yang sudah mulai marak tapi belum maksimal", tutup Nevi Zuairina.

Demi Freeport, Pemerintah Jangan Langgar UU

Sebagai negara hukum, Pemerintah harus tunduk pada Undang-Undang No.3 Tahun 2020, yang dibuatnya bersama DPR RI. Pemerintah jangan mengulangi preseden buruk sebelumnya, yang melanggar UU. No. 4/2009 dengan membiarkan Freeport tidak mencapai target penyelesaian pembangunan smelter dan mengijinkan mereka mengekspor konsentrat tambang

Dr. H. MULYANTO, M.Eng
Anggota Komisi VII DPR RI

Jakarta (03/08) --- Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, meminta Pemerintah menolak permohonan relaksasi pembangunan smelter oleh PT Freeport Indonesia (PTFI).

Mulyanto menegaskan Pemerintah harus patuh pada target waktu pembangunan smelter yang diatur dalam UU Minerba yang baru.

Smelter adalah tempat pemurnian sisa material tambang berdasarkan masing-masing unsur.

Dengan pembangunan smelter ini diharapkan Pemerintah Indonesia bisa mendapatkan nilai tambah dari setiap hasil tambang yang dihasilkan oleh PTFI termasuk membuka lapangan kerja baru.

Dalam UU Minerba, yang baru 1 bulan dicatat dalam lembar negara, tersebut diatur bahwa target pembangunan smelter PTFI adalah tahun 2023. Dan sejak saat itu PTFI dilarang melakukan ekspor konsentrat murni. Semua konsentrat tambang harus diproses dalam smelter yang dibangun tersebut.

"Sebagai negara hukum, Pemerintah harus tunduk pada Undang-Undang No.3 Tahun 2020, yang dibuatnya bersama DPR RI. Pemerintah jangan mengulangi preseden buruk sebelumnya, yang melanggar UU. No. 4/2009 dengan membiarkan Freeport tidak mencapai target penyelesaian pembangunan smelter dan mengijinkan mereka mengekspor konsentrat tambang," tegas Mulyanto.

Wakil Ketua Fraksi PKS ini menambahkan, Pemerintah harus tegas dalam melaksanakan Undang-Undang. Jangan mau didikte oleh badan usaha yang secara nyata terbukti beberapa kali melanggar janji memenuhi peraturan perundangan.

Karena itu, imbuh Mulyanto, Pemerintah wajib menolak permohonan PTFI untuk mendapatkan relaksasi target pembangunan smelter melewati tahun 2023.

"Untuk membangun Indonesia sebagai Negara Hukum, tidak cukup sekedar membentuk UU yang berkualitas dan aspiratif saja, namun yang utama adalah bagaimana kita menjalankan dan mematuhi norma ketentuannya secara konsisten, untuk kemudian mengembangkan budaya hukum di dalam masyarakat," ungkapnya.

Rakyat itu, kata Mulyanto, akan melihat patronnya, apakah kita memberi contoh keteladan yang baik atau tidak.

"Kalau Pemerintah saja melanggar UU di depan mata mereka, maka jangan harap kita meminta rakyat untuk mematuhi UU. Karena ada pepatah, guru kencing berdiri. Murid kencing berlari," ujar Sekretaris Menteri Riset dan Teknologi zaman Presiden SBY ini.

"Saya sebagai anggota DPR RI protes keras. Sebab UU dibuat untuk dipatuhi oleh kita bersama, bukan dianggap 'sebagai angin lalu'. Ini benar-benar melecehkan Indonesia sebagai Negara hukum," imbuhnya.

Karenanya, lanjut Mulyanto, pihaknya mendesak Pemerintah untuk tegas melaksanakan dan mengawal amanat yang ada dalam Undang-undang.

"Dalam hal ini UU No. 3/2020 sebagai perubahan atas UU. No.4/2009 tentang Minerba, khususnya pasal 170A. Pemerintah jangan lembek, apalagi ikut melanggar UU tersebut," tukas Mulyanto.

Ponpes Sentra Pengembangan Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Syariah,

HNW: Kami Dukung

"Sebagai alumni Pesantren, saya sambut baik rencana Pemerintah itu, dengan harapan agar Program tersebut benar-benar dilakukan dengan profesional, amanah, adil dan tanpa politisasi. Pesantren juga penting siap dan disiapkan untuk menyukseskan Program tersebut, dengan tetap menjaga kemandirian & jati diri Pesantren"

Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI Jakarta II

Jakarta (30/07) --- Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid menyambut baik dan mengapresiasi rencana Pemerintah untuk menjadikan Pondok Pesantren (Ponpes) sebagai salah satu Episentrum pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan Syariah.

Wakil Ketua MPR RI ini menilai jumlah Pondok Pesantren yang berdasarkan pernyataan Menag sebanyak 28.194 dengan jumlah santri mukim sekitar 5 juta, bila disiapkan dan diprogramkan dengan baik, akan mampu mendorong inklusi dan literasi keuangan syariah di Indonesia.

"Sebagai alumni Pesantren, saya sambut baik rencana Pemerintah itu, dengan harapan agar Program tersebut benar-benar dilakukan dengan profesional, amanah, adil dan tanpa politisasi. Pesantren juga penting siap dan disiapkan untuk menyukseskan Program tersebut, dengan tetap menjaga kemandirian dan jati diri Pesantren", disampaikan pria yang akrab disapa HNW ini dalam keterangan tertulis di Jakarta (29/07/2020).

HNW sapaan akrabnya menilai, program yang diluncurkan Pemerintah tersebut sejatinya adalah implementasi dari diterbitkannya UU Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren. Misalnya di Pasal 42 UU Pesantren, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diamanatkan untuk memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren dalam bentuk kerja sama program, fasilitas kebijakan, dan pendanaan.

Oleh karena itu, HNW mengapresiasi kebijakan Pemerintah yang konsekuen jalankan UU Pesantren.

Lebih lanjut, HNW yang juga Anggota DPR RI Komisi VIII yang membidangi urusan Agama mengingatkan jangan sampai peluncuran program baru ini mengalihkan Pemerintah dari program yang sudah ada sebelumnya, seperti misalnya Program Bantuan Operasional Covid-19 untuk Pesantren dengan anggaran Rp 2,6 Triliun oleh Kementerian Agama.

Menurutnya, sangat baik jika kedua program tersebut disinkronkan, di mana Pesantren dibantu untuk protokol kesehatan sekaligus disiapkan langkah pemberdayaan ekonomi yang khas Pesantren seperti ekonomi Syariah.

"Ekonomi Pesantren memiliki angka multiplier ekonomi yang tinggi karena jumlah santri yang banyak dan bersentuhan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar. Jika implementasinya baik, program ini bisa jadi momentum mendorong Pertumbuhan Ekonomi dari Pondok Pesantren, terutama untuk masyarakat di sekitar Pesantren. Program ini juga diharapkan mampu menyiapkan para santri menjadi SDM yang berkeahlian dan profesional dalam bidang pengelolaan ekonomi syariah yang dapat berkontribusi menyukseskan program Pemerintah (Menkeu dan Presiden), yakni menjadikan Indonesia, Negara dengan populasi Muslim terbesar sedunia, sebagai Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah", pungkas HNW.

Sebagaimana diberitakan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan acara "Peluncuran Implementasi Ekosistem Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Berbasis Pondok Pesantren" di Jakarta (28/07/2020).

Acara ini meluncurkan program pengembangan ekonomi pesantren berbasis keuangan syariah, dan menargetkan implementasinya dapat terlaksana pada 3.300 pondok Pesantren di seluruh Indonesia hingga 2024.

Jenazah ABK PMI Kembali Dilarung

Mufida Desak Pemerintah Berikan Jaminan Perlindungan

Kita semua berdoa tidak ada WNI yang menjadi korban dan meminta Kementerian Luar Negeri melalui Kedutaan Besar kita untuk menyampaikan laporan dan informasi aktual menit per menit. Hal ini untuk memberikan ketenangan kepada keluarga WNI yang ada di Indonesia.

Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.
Anggota Komisi IX DPR RI

Jakarta – Kasus pelarungan jenazah Anak Buah Kapal (ABK) asal Indonesia oleh kapal berbendera China kembali terjadi. Kali ini dua orang ABK, Daroni dan Riswan meninggal di atas kapal Han Rong 363 dan Han Rong 368. Jenazah dibuang ke laut pada 29 Juli 2020.

Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menyesalkan kembali terjadinya kasus pelarungan ABK asal Indonesia oleh kapal berbendera China. Sebelumnya, tercatat sudah lima ABK asal Indonesia yang nasibnya sama dengan Daroni dan Riswan dan sempat membuat geger publik.

"Waktu itu heboh hingga berujung pemanggilan Dubes China oleh Kemenlu. Ternyata sekarang terjadi dan berulang lagi. Artinya China menganggap enteng apa yang terjadi terhadap ABK asal Indonesia dan pemerintah kurang wibawa untuk melindungi nasib Pekerja Migran Indonesia (PMI)," terang Mufida dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (6/8/2020).

Mufida menambahkan, kejadian ABK asal Indonesia yang mendapat perlakuan tidak layak hingga meninggal dunia harus diusut dari hulu ke hilir. Ia meminta agar Pemerintah segera menerbitkan PP sebagai aturan teknis turunan dari UU No 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI).

Mufida juga pemerintah segera meratifikasi Konvensi ILO 188 agar ada kemampuan hukum Internasional bagi pemerintah dalam melindungi ABK Indonesia.

"Aturan turunan di pemerintah belum selesai, ini hal serius tidak soal nyawa anak bangsa di luar negeri. Aturan ini bukan hanya melindungi PMI yang berprofesi sebagai ABK. Jika tidak ada aturan teknis, ke depan jika ada kasus diskriminasi PMI kita akan gelagapan lagi," papar Mufida.

Kemudian Mufida meminta perizinan satu pintu. Mufida menyebut saat ini izin untuk menjadi ABK masih di bawah Kementerian Perhubungan. Sementara ada tiga kementerian yang terkait dengan kasus ABK ini yakni Kementerian Perhubungan, Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

"Soal izin harus satu pintu agar tidak ada Kementerian atau lembaga yang kemudian saling menunggu jika ada permasalahan," papar Mufida.

Mufida menegaskan penegakan aturan juga akan memperkecil kesempatan rekrutmen ABK secara ilegal. Rekrutmen ilegal ABK justru akan membuka tindak diskriminasi yang besar terhadap ABK asal Indonesia.

"Perlindungan terhadap ABK dimulai dari adanya aturan yang jelas dan penegakannya. Jangan sampai kejadian ini akan terus berulang dengan pola yang sama. Meninggalnya anak bangsa karena sebuah tindak perbudakan adalah kegagalan negara melindungi warganya," kata Mufida menambahkan

Ujicoba Vaksin Asal China

Netty: Pastikan Vaksin Aman Dan Prosesnya Transparan

"Dari sejumlah produsen dan negara pembuat vaksin Covid-19, kenapa dari China yang diujikan? Ini harus dijelaskan oleh pemerintah kepada publik dengan komunikasi yang baik. Jangan sampai tersebar berita-berita yang menguatkan keraguan masyarakat atas tidak amannya vaksin tersebut

Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si
Anggota Komisi IX DPR RI

Indramayu (03/08) --- Vaksin Sinovac asal China akan diujikan mulai Agustus pada 1.620 relawan. Berdasarkan laporan Kepala Bagian Komunikasi Perusahaan Bio Farma, Iwan Setiawan sebanyak 2400 unit vaksin Sinovac telah tiba di Indonesia. Bio Farma akan melakukan uji klinis fase III, sedangkan fase I dan II sudah dilakukan di China.

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah memastikan dulu bahwa vaksin tersebut aman untuk diujicobakan.

"Jika benar sudah uji coba fase I dan II, datanya harus transparan, jangan ada yang ditutup-tutupi. Kita tahu BPOM China pernah mengumumkan adanya sejumlah vaksin di bawah standar yang diproduksi dan diedarkan ke masyarakat. Ini kan berbahaya, apalagi jika digunakan pada anak-anak. Kita harus mengantisipasi hal tersebut agar jangan terjadi di Indonesia," kata Netty usai melakukan kunjungan ke Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya Darma Kencana, Indramayu, Minggu (02/08/2020).

"Harus dipastikan bahwa proses produksi dan pengedaran vaksin sudah sesuai standar WHO. Jangan sampai ada yang dilewatkan. Sebab vaksin yang cacat produksi atau di bawah standar pasti tidak aman dan membawa risiko tinggi pada penggunanya," tambah Netty.

Berdasarkan standar WHO, vaksin harus melalui uji coba ketat sebelum diedarkan ke masyarakat. Pengujian di laboratorium pada hewan percobaan meliputi uji keamanan, imunogenitas, dan efikasi. Sedangkan uji klinis pada manusia dilakukan sebanyak tiga fase.

Selain itu menurut Netty, pemerintah harus bisa menjelaskan kepada masyarakat mengapa vaksin Sinovac yang dipilih untuk diujikan di Indonesia.

"Dari sejumlah produsen dan negara pembuat vaksin Covid-19, kenapa dari China yang diujikan? Ini harus dijelaskan oleh pemerintah kepada publik dengan komunikasi yang baik. Jangan sampai tersebar berita-berita yang menguatkan keraguan masyarakat atas tidak amannya vaksin tersebut. Jika memang aman dan prosesnya sesuai standar WHO, publikasikan datanya secara transparan. Jangan biarkan publik curiga dan menduga-duga ada sesuatu dalam pengujian vaksin tersebut" tandas Netty.

الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا

إنا لله وإنا إليه راجعون

Turut berduka atas berpulanngya
ke rahmatullah Anggota Fraksi PKS
DPRD DKI Jakarta

H. DANY ANWAR

Wafat pada Senin 13 Dzulhijjah 1441 H/
3 Agustus 2020 pukul 10.00 WIB
di RS AL Bendungan Hilir Jakarta Pusat

Semoga Allah SWT menerima amal
ibadahnya dan menempatkannya di
tempat terbaik di Jannah-Nya.
Amin.

Habib Aboe Bakar Alhabsyi
Ketua MKD DPR RI

Pelebaran Defisit Harus Tetap Prudent

Wakil Ketua FPKS: Hormati Kesepakatan dengan DPR

Utang dan penambahan utang membawa konsekuensi kewajiban pembayaran bunga utang untuk masa yang panjang dan pada akhirnya akan membebani rakyat. Menjadi beban generasi mendatang.

H. ECKY AWAL MUCHARAM
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI

Jakarta (30/07) --- Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Ecky Awal Mucharam mengingatkan agar pemerintah tetap prudent terkait pelebaran defisit APBN dan menjaga kesepakatan dengan DPR.

"Rentang angka defisit APBN tahun 2021 telah dibahas bersama antara Pemerintah dengan DPR. Angkanya sudah diusulkan oleh Pemerintah dan dibahas bersama DPR. Jangan tiba-tiba sepihak dilakukan perubahan diluar rentang yang sudah disepakati. Pelebaran Defisit terkait dengan utang yang akan menjadi beban generasi kedepan. Jadi harus tetap hati-hati dan mempertimbangkan benefit, efisiensi dan efektivitasnya", tegasnya menanggapi perkembangan rencana Pemerintah yang akan melebarkan defisit.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah berencana memperlebar defisit anggaran dalam RAPBN 2021 dari 4,17 persen menjadi 5,2 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB).

Menteri Keuangan menyampaikan bahwa dalam sidang kabinet, Presiden memutuskan akan memperlebar defisit menjadi 5,2 persen dari PDB. Sebelumnya, pemerintah lewat Kemenkeu telah menyerahkan desain awal RAPBN 2021 dengan menggunakan angka yang disepakati dimana defisit terhadap PDB sebesar 4,7 persen terhadap PDB.

Namun, RAPBN tersebut akan direvisi karena Presiden menilai pemerintah membutuhkan bantalan cadangan belanja lebih.

Menteri Keuangan menyampaikan dengan kenaikan defisit di 5,2 persen terhadap PDB pemerintah akan memiliki cadangan belanja sebesar Rp179 triliun pada 2021.

"Kita mempertanyakan pelebaran yang besar ini untuk apa lagi. Arah peruntukannya untuk apa lebih detail tidak dijelaskan. Ini berdampak serius karena defisit meningkat, utang makin melonjak, sehingga rasio utang terhadap PDB atau debt to GDP ratio kita bisa mencapai kisaran 40 persen. Ini makin berat", imbuhnya.

Ecky mengingatkan bahwa dalam Rapat Paripurna DPR terakhir, Pemerintah dan DPR telah menyepakati kerangka asumsi makro untuk RAPBN 2021.

Dalam pembahasan telah disepakati terkait rentang defisit anggaran 3,21-4,17% terhadap PDB atau paling besar 4,7%, rasio utang di kisaran 37,64-38,5% terhadap PDB, dan keseimbangan primer 1,24-2,07% terhadap PDB. Selain itu disepakati pertumbuhan ekonomi 4,5-5,5%, laju inflasi 2-4%, nilai tukar rupiah Rp 13.700-Rp 14.900 per dolar Amerika Serikat, tingkat suku bunga SBN 10 tahun 6,29-8,29%, dan harga minyak mentah Indonesia (ICP) US$ 42-US$ 45 per barel.

Selain itu, lifting minyak bumi sebesar 690 ribu-710 ribu barel per hari, serta lifting gas bumi sebesar 990 ribu-1,01 juta barel setara minyak per hari.

"Jadi rentang yang disepakati untuk defisit anggaran 3,21-4,17 persen terhadap PDB dan rasio utang di kisaran 37,64-38,5 persen terhadap PDB. Ini sudah dibahas cukup mendalam dan mempertimbangkan kebutuhan untuk pemulihan ekonomi yang memadai. Sehingga secara umum seharusnya sudah memadai dan jangan sepihak diubah. Utang yang besar akan membebani APBN kita dalam jangka panjang. Beban bunganya akan sangat berat", imbuhnya.

Ecky juga mengkritisi kinerja Pemerintah dalam pengelolaan utang dinilai kurang efektif untuk menjamin biaya minimal dan risiko terkendali serta kesinambungan fiskal.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Serahkan Surat Nasabah AJB Bumiputera

Anis Harap Manajemen dan Nasabah segera Bertemu

“Semoga para nasabah segera mendapatkan haknya dengan kembalinya dana mereka. Dan semoga dalam masa sidang yang akan datang, Komisi XI bisa menjadwalkan pertemuan dengan para nasabah Bumiputera,”

Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si
Anggota Komisi XI DPR RI

Jakarta (04/08) --- Menepati janjinya untuk memperjuangkan hak nasabah AJB Bumiputera yang menemuinya di Gedung DPR RI Rabu (29/07/2020) lalu, Anis Byarwati, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS hari ini, menyerahkan surat tersebut kepada sekretariat Komisi XI DPR RI.

Surat yang diterima oleh Kepala Sub Bagian Rapat (kasubag rapat) Komisi XI DPR RI, Semiyati, ini berisikan tentang permohonan perwakilan nasabah AJB Bumiputera kepada pimpinan Komisi XI untuk dimediasi dan dipertemukan dengan manajemen AJB Bumiputera.

Dengan pertemuan tersebut diharapkan terjalin komunikasi yang baik antar kedua pihak serta didapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi mereka.

“Walaupun sekarang sedang masa reses, tetapi saya secara resmi menyampaikan surat ini sebagai amanah dari perwakilan nasabah AJB Bumiputera yang menemui saya dan menyampaikan problematikanya beberapa waktu lalu," ungkap Anis yang merupakan Legislator Asal Dapil Jakarta Timur ini.

Anis juga menegaskan bahwa langkah yang diambilnya merupakan proses awal dimana setelah surat ini masuk kepada sekretariat Komisi XI DPR RI, pihak sekretariat akan berkomunikasi dengan pimpinan untuk menjadwalkan pertemuan dengan nasabah AJB Bumiputera.

“Semoga para nasabah segera mendapatkan haknya dengan kembalinya dana mereka. Dan semoga dalam masa sidang yang akan datang, Komisi XI bisa menjadwalkan pertemuan dengan para nasabah Bumiputera,” ungkap Anis penuh harap.

Sebagai penutup, Anis menegaskan bahwa dengan disampaikannya surat dari perwakilan nasabah kepada secretariat Komisi XI, menjadi pertanda telah ditunaikannya amanah yang dititipkan kepadanya.

Webinar

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Merumuskan Skema Jaminan Kesejahteraan Komprehensif Bagi Atlet

SABTU
8 Agustus 2020
pk. 13.00 WIB s.d
pk. 15.30 WIB

Live Virtual:
Facebook dan Youtube
Fraksi PKS DPR RI

KEYNOTE SPEECH
Dr. H. Jazuli Juwaini, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI

NARASUMBER
H. Tjahjo Kumolo, S.H. *
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
"Kebijakan Bidang Kepegawaian bagi Atlet"

Krishna Syarif
Direktur Pelayanan BPJS ketenagakerjaan
"Skema Jaminan Hari Tua Atlet dan Mantan Atlet, Masalah dan Alternatif Solusi"

Andayani Budi Lestari, SE, MM, AAK
Direktur perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan
"Skema Jaminan Kesehatan Para Atlet dan Mantan Atlet, Masalah dan Alternatif Solusi""

MODERATOR
Agus Widiarto. S.S. MPA

fraksipksdprri @fpksdprri fraksi.pks.id Fraksi PKS DPR RI PKSTV DPR RI

BKSAP – AIPA Fokus Tingkatkan Kualitas Pendidikan di ASEAN

Fokus yang pertama tentang bagaimana menjaga serta meningkatkan kualitas pendidikan di era Covid-19. Tadi Filipina bagus, dimana perusahaan telekomunikasi mereka diminta untuk meningkatkan CSR-nya, sehingga bisa memberikan kuota internet gratis. Kemudian, tadi Vietnam mendesain kurikulum yang lebih simple. Jadi, bagi BKSAP DPR RI, pertemuan sore ini membuat kita mendapat best practice

Dr. H. Mardani, M.Eng.
Wakil Ketua BKSAP DPR RI

BKSAP – AIPA Fokus Tingkatkan Kualitas Pendidikan di ASEAN

Fokus yang pertama tentang bagaimana menjaga serta meningkatkan kualitas pendidikan di era Covid-19. Tadi Filipina bagus, dimana perusahaan telekomunikasi mereka diminta untuk meningkatkan CSR-nya, sehingga bisa memberikan kuota internet gratis. Kemudian, tadi Vietnam mendesain kurikulum yang lebih simple. Jadi, bagi BKSAP DPR RI, pertemuan sore ini membuat kita mendapat best practice,"

Dr. H. MARDANI, M.Eng
Wakil Ketua BKSAP DPR RI

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera mengikuti meeting virtual yang diselenggarakan oleh ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) meeting on Educational and Cultural Cooperation (ECC). Mardani menyatakan, BKSAP bersama negara ASEAN lainnya dalam pertemuan tersebut saling berbagi pandangan untuk memberikan perhatian secara khusus terhadap peningkatan kualitas pendidikan di tengah pandemi Covid-19.

Sehingga, end result memihak kepada para siswa dan siswi di ASEAN secara keseluruhan untuk membangun 'ASEAN as Single Community' yang maju. Hal itu disampaikan Mardani di sela-sela pertemuan BKSAP DPR RI dengan AIPA-ECC yang bertajuk "Parliamentary Partnership on Educational and Cultural Cooperation for Sustainable Development", di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (30/7/2020).

"Fokus yang pertama tentang bagaimana menjaga serta meningkatkan kualitas pendidikan di era Covid-19. Tadi Filipina bagus, dimana perusahaan telekomunikasi mereka diminta untuk meningkatkan CSR-nya, sehingga bisa memberikan kuota internet gratis. Kemudian, tadi Vietnam mendesain kurikulum yang lebih simple. Jadi, bagi BKSAP DPR RI, pertemuan sore ini membuat kita mendapat best practice," ujarnya.

Lebih lanjut, Mardani mengungkapkan, BKSAP DPR RI dalam pertemuan itu memberikan pandangan tentang penambahan budgeting di sektor pendidikan seperti yang telah diterapkan di Indonesia. Selain itu, lanjut politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) ini, juga pemberian kebebasan kepada local territory terkait kebijakan buka tutup sekolah hingga wacana penghapusan Ujian Nasional.

Selain itu, dalam pertemuan tersebut, Mardani mengajukan pandangan mengenai pentingnya kolaborasi antar negara ASEAN terutama yang bertetangga dalam penyediaan infrastruktur internet. Mardani menyampaikan, gagasan itu selaras dengan AIPA quotes tentang 'Seamless Connectivity' untuk suplai penyediaan fasilitas internet khususnya di daerah terluar, terpinggir dan tertinggal (3T) di masing-masing negara.

"Inilah pentingnya AIPA quotes tentang 'Seamless Connectivity' Contohnya, beberapa daerah 3T di Indonesia ada yang lebih dekat ke Filipina atau Malaysia. Maka, kita usulkan untuk suplai internet ke daerah 3T itu bersumber dari kedua negara itu. Sebaliknya, warga Filipina yang dekat Sulut mendapatkan fasilitas dari Indonesia. Kita ajukan, demi membangun 'ASEAN as Single Community' yang maju," pungkasnya. (pun/sf)

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Politisi PKS: Pemerintah Jangan Tambah Lagi Beban Masyarakat

Saya sebagai wakil rakyat, akan mengingatkan pemerintah untuk serius menyelesaikan permasalahan rakyat. Saya bersama Fraksi PKS terus mengawasi jalannya pemerintahan, serta mengawal RUU yang sedang dibahas agar ketika masyarakat sibuk berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya

Teddy Setiadi, S.Sos.
Anggota Komisi II DPR RI

Politisi PKS: Pemerintah Jangan Tambah Lagi Beban Masyarakat

Saya sebagai wakil rakyat, akan mengingatkan pemerintah untuk serius menyelesaikan permasalahan rakyat. Saya bersama Fraksi PKS terus mengawasi jalannya pemerintahan, serta mengawal RUU yang sedang dibahas agar ketika masyarakat sibuk berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya

TEDDY SETIADI, S.Sos.
Anggota Komisi II DPR RI

Bandung (30/07) --- Anggota Komisi II DPR RI, Teddy Setiadi, meminta kepada pemerintah agar tidak lagi menambah beban masyarakat.

Dalam kunjungan perorangan ke kota Bandung, Teddy memberikan bantuan sembilan bahan pokok (sembako) kepada masyarakat terdampak covid 19.

Masyarakat berterimakasih atas bantuan yang diberikan sambil mengungkapkan keluh kesahnya.

"Tolong disampaikan, pemerintah jangan nambah lagi beban kita dong, udah mah sulit nyari kerja, yang kerja juga dirumahkan, listrik mahal, sembako gak kebeli, anak juga harus belajar online artinya nambah pengeluaran, jangan pemerintah malah sibuk bikin gaduh masyarakat, ada ribut UU HIP lah, koruptor yang bebas kemana-mana, kita buat makan aja susah," pungkasnya.

Menanggapi keluhan tersebut, teddy menyanpaikan bahwa beliau siap untkk menyampaikan aspirasi tersebut agar pemerintah lebih serius untuk menyelesaikan permasalahan rakyat.

"Saya sebagai wakil rakyat, akan mengingatkan pemerintah untuk serius menyelesaikan permasalahan rakyat. Saya bersama Fraksi PKS terus mengawasi jalannya pemerintahan, serta mengawal RUU yang sedang dibahas agar ketika masyarakat sibuk berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, RUU yang berdampak pada masyarakat dan kebijakan pemerintah lainnya bisa kita kawal supaya tidak menambah kesulitan masyarakat" ungkap Teddy

"Do'akan kami dan Anggota Dewan fraksi PKS lainnya agar bisa terus berjuang menghadirkan keadilan dan kesejahteraan untuk masyarakat." tutup teddy

Di Masa Reses

Anis Tawarkan Program Pemberdayaan UMKM untuk Usaha Kue Bolen Ibu Nita

"Sektor UMKM ini sangat penting menghidupkan ekonomi masyarakat saat ini. Dan banyak program pemerintah yang bisa diakses

Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si
Anggota Fraksi PKS DPR RI Daerah Pemilihan DKI Jakarta I

Jakarta (30/07) --- Bermula dari pensiunnya kepala rumah tangga dan mandeknya usaha catering karena pandemi Covid-19, Ibu Nita dengan modal 300 ribu rupiah berusaha memutar dana agar menghasilkan uang lebih banyak.

Nita mencoba belajar mengolah kue dari informasi yang ia dapatkan melalui google. Setelah beberapa kali mencoba resep, ia memberanikan diri mendirikan usaha kue rumahan Bolen Kita.

Awalnya, usaha Nita hanya menghasilkan 5 kotak kue bolen per hari. Namun kini, produksi sudah mencapai 50 kotak kue per hari.

Nita mengandalkan pemasaran melalui tetangga dan teman-teman. Berkat upaya Nita menjaga kualitas dan kesegaran kue-kuenya (*ready made fresh from the oven*) pesanan demi pesanan pun berdatangan.

Hal ini karena Nita melayani pesanan pre-order sehingga kue selalu dibuat baru setiap harinya, walau pun kue ini sudah teruji dapat bertahan sekitar seminggu dan tetap aman dikonsumsi.

Tertarik dengan upaya yang dilakukan Nita, Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati, mengunjungi rumah Nita pada Selasa, (28/07/2020) dalam rangka berdialog dan menyerap aspirasi.

Dalam kunjungan ke rumah Nita yang berlokasi di Kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecamatan Ciracas ini, Anis menyimak perjalanan usaha keluarga Nita yang didukung oleh suami dan dua putra putrinya.

Mereka membantu berbagai hal mulai dari berbelanja, promosi dan pelayanan pemesanan melalui media social (Instagram, Facebook dan Whatsapp).

Menurut Nita, banyak ibu-ibu tetangga dan teman-teman yang ingin belajar dan ikut berusaha membuat kue. Namun, Nita mengalami beberapa hambatan seperti keterbatasan ruangan dan peralatan.

Dapur yang selama ini digunakan untuk produksi kue hanya menempati halaman sempit di depan rumah Nita yang berlokasi di gang yang juga sempit.

Ada pun peralatan yang dimiliki Nita hanya sebuah oven gas dan mixer dengan kapasitas untuk dapur keluarga, "Itu pun semua masih mencicil," ungkap Nita sambal tersenyum.

Mendengar kesulitan yang dihadapi Nita, Anis mengajak dan menawarkan Nita untuk bergabung dengan kelompok pelaku UMKM lain di sekitar Jakarta Timur agar dapat mengakses bantuan pemberdayaan UMKM dari pemerintah.

"Sektor UMKM ini sangat penting menghidupkan ekonomi masyarakat saat ini. Dan banyak program pemerintah yang bisa diakses," ujar Anis memberi solusi.

Bersama Mentan, Akmal Kembali Turun Serahkan Bantuan Korban Banjir

Saya berharap, hadirnya bapak menteri ini memberikan sumbangsih signifikan kepada rakyat terdampak bencana. Selain itu, masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan masih perlu campur tangan pemerintah yang merupakan pekerjaan jangka panjang yang hingga saat ini belum selesai

Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P.,M.M
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sulawesi Selatan II

Kabupaten Bone (30/07) -- Anggota DPR RI komisi IV, Andi Akmal Pasluddin bersama Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL) menyerahkan Bantuan sembako, bibit/benih dan Alsintan utk masyarakat Kec.Belawa Kab.Wajo yang terkena dampak banjir.

Sebelumnya Akmal telah datang sendiri bersama team lapangan dapil nya untuk menyerahkan bantuan Korban Banjir. Tetapi Bantuan yang ia berikan tidak dapat menjangkau banyak masyarakat yang terdampak musibah ini. Dengan menggandeng Pemerintah, dalam hal ini kementerian pertanian, ia berharap jangkauan bantuan semakin meluas dan memperkecil masyarakat terdampak yang tidak mendapat bantuan.

"Semoga segera pulih aktivitas masyarakat pasca banjir ini. Karena dengan segera pulihnya keadaan, masyarakat dapat melakukan aktivitas pertanian kembali seperti sedia kala", Ujar Andi Akmal.

Kedatangan pejabat pemerintah dan Legislator asal Sulawesi Selatan II menjadikan bukti bahwa ada kepedulian terhadap masyarakat sehingga ada harapan akan perbaikan kehidupan masyarakat selanjutnya. Masyarakat berharap, kehadiran pemerintah dan legislator tidak hanya sesaat-sesaat saja. Karena mereka beranggapan perbaikan kehidupan masyarakat memerlukan intensitas kehadiran pemerintah.

"Saya berharap, hadirnya bapak menteri ini memberikan sumbangsih signifikan kepada rakyat terdampak bencana. Selain itu, masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan masih perlu campur tangan pemerintah yang merupakan pekerjaan jangka panjang yang hingga saat ini belum selesai", tutup Andi Akmal Pasluddin.

Hermanto Serahkan Sembako Kepada Masyarakat Desa dan Pemulung

Semoga bermanfaat dan barokah. Konsumsi pangan yang cukup dapat meningkatkan daya tahan tubuh sehingga terhindar dari wabah Covid-19

Dr. HERMANTO, S.E., M.M
Anggota Komisi IV DPR RI

\Padang (01/08) --- Anggota Komisi DPR RI Dapil Sumbar I Hermanto dalam kunjungan kerjanya di daerah pemilihan menyerahkan bantuan sembako kepada masyarakat di Desa Lumindai, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto.

Penyerahan serupa dilakukan juga kepada komunitas pemulung sampah di Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang.

Kepada para penerima sembako, Hermanto berharap agar bantuan yang diterima bermanfaat dan barokah.

"Semoga bermanfaat dan barokah. Konsumsi pangan yang cukup dapat meningkatkan daya tahan tubuh sehingga terhindar dari wabah Covid-19," katanya.

"Kepada bapak dan ibu saya mohon doa agar dimudahkan dan dilancarkan dalam menunaikan amanah sebagai anggota DPR," tambahnya.

Bantuan sembako untuk masyarakat Sawahlunto diserahkan secara simbolis kepada Kepala Desa Lumindai Chairunnas. Dalam penyerahan tersebut Hermanto didampingi tokoh muda Sawahlunto Alfi Syukri.

Sedangkan pada penyerahan sembako kepada pemulung di Padang, Hermanto didampingi oleh anggota DPRD Kota Padang Pun Ardi.

Chairunnas menyatakan terima kasih atas perhatian Hermanto kepada warganya.

"Dari sekian Anggota DPR RI, baru Bapak yang berkunjung ke desa kami. Semoga bapak terpilih kembali sebagai Anggota DPR RI pada periode berikutnya. Kami siap bantu," ucapnya.

Sampaikan Aspirasi

PW Muhammadiyah Maluku Minta Dukungan Bangun SMK Migas

"Kemiskinan yang menjadi wajah Maluku saat ini dapat perlahan dientaskan. Blok Masela memberi kontribusi secara ekonomi bagi kesejahteraan rakyat di Maluku"

SAADIAH ULUPUTTY, S.T
Anggota Komisi VII DPR RI

Ambon (29/07) --- Setelah disetujui Plan Of Development (POD) Blok Gas Masela oleh Presiden Jokowi tahapan pembangunan blok Masela akhirnya dimulai. Menurut rencana, tahun 2027, blok masela telah dapat memproduksi gas.

Pengurus Wilayah Muhammadiyah Provinsi Maluku menyambut baik rencana tersebut. Pihak PW Muhammadiyah mengambil bagian dengan menyiapkan SDM dengan pendidikan kejuruan lewat pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Migas di Maluku.

Ketua PW Aisyiah Maluku memaparkan ide pendirian SMK Migas pada pertemuan menjaring aspirasi dalam rangka reses bersama tokoh agama, tokoh masyarakat dan jajaran pengurus Wilayah Muhamadiyah Maluku bersama anggota DPR Dapil Maluku Saadiah Uluputty, Selasa (28/07/2020).

"Muhamamdiyah lewat organisasi otonom Aisyiah ingin berkontribusi menyiapkan SDM anak-anak Maluku yang terampil dan siap pakai, menyambut beroperasinya Blok Masela", kata Aisa Manilet, Ketua Wilayah Aisyiah Maluku.

Aisa Manilet menandaskan, beroperasinya Blok Masela akan memberi dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi Maluku.

"Kemiskinan yang menjadi wajah Maluku saat ini dapat perlahan dientaskan. Blok Masela memberi kontribusi secara ekonomi bagi kesejahteraan rakyat di Maluku", lanjut akademisi IAIN Ambon ini.

Karenanya, Aisyiah ingin memastikan SDM asal Maluku dapat terlibat untuk berkarya di Blok Masela, termasuk kebutuhan pada tenaga teknis.

"SMK Migas telah kami sampaikan pada tanwir Aisyiah di Surabaya. Sudah disetujui. Kami butuh dukungan agar segera terealisasi di Maluku", harap Aisa.

Aisa memaparkan, jika pengembangan dan operasionalisasi SMK Migas membutuhkan SDM khusus. Karena bidang pengembangan pendidikannya juga spesifik.

"Kami berharap ada sinergi dan dukungan dari pemerintah provinsi Maluku terutama pada alokasi anggaran untuk pengembangan SDM. SMK Migas adalah kontribusi Aisyiah dan Muhamadiyah bagi Maluku", papar dia.

Penguatan SDM untuk mendukung operasinya Blok Masela diamini oleh DR Marzuki Ilyas, salah satu pimpinan Wilayah Muhammadiyah Maluku. Ia menyebut jika kebutuhan SDM Maluku untuk mensupport pengembangan blok Masela terutama pada SDM Vokasi.

"Maka harus ada kejelasan MoU antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan vokas dengan pemegang kendali blok masela", kata Marzuki.

Menurutnya, MoU ini untuk memastikan SDM anak Maluku dapat memiliki kepastian untuk terserap di blok Masela.

"Investasi blok Masela nilainya signifikan, 20 Milyar US Dollar. Serapan tenaga kerja juga besar. Diperkirakan pada kisaran 73.000 tenaga kerja", detail anggota Komisi VII ini.

Maka, lanjut Saadiah, sejatinya anak-anak Maluku tidak boleh hanya jadi penonton.

"Anak – anak Maluku perlu dididik pada SMK berbasis pendidikan Migas, Pendidikan Vokasi dan pelatihan khusus sehingga ikut terlibat di blok Masela", tegasnya.

Selain SMK Migas, PW Muhammadiyah Maluku juga meminta dukungan Saadiah dan Fraksi PKS DPR RI untuk mendorong percepatan Universitas Muhammadiyah Maluku (UNIMMA).

Kunjungi Cahaya Aceh

Rafli Serahkan Bantuan

Kita sangat mengapresiasi para guru yang mengajar secara suka rela di balai edukasi dan pembinaan cahaya Aceh, meskipun di tempat yang sederhana namun mampu melahirkan generasi cerdas dan beriman, kita bisa lihat dari ketrampilan anak - anak usia sekolah dasar yang belajar disini, sudah mampu berpidato dengan bahasa arab dan Turki

RAFLI
Anggota Komisi VI DPR RI

Banda Aceh (04/08) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Rafli, menyerahkan bantuan di Balai Edukasi dan Pembinaan Yayasan Cahaya Aceh di Lambada Lhok, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, Senin (03/08/2020).

Bantuan yang berasal dari program Bina Lingkungan BUMN PT. Hutama Karya, diarahkan Wakil Rakyat Fraksi PKS itu untuk masyarakat Baitussalam, melalui balai edukasi dan pembinaan Cahaya Aceh Foundation senilai Rp. 30 Juta.

"Kita sangat mengapresiasi para guru yang mengajar secara suka rela di balai edukasi dan pembinaan cahaya Aceh, meskipun di tempat yang sederhana namun mampu melahirkan generasi cerdas dan beriman, kita bisa lihat dari ketrampilan anak - anak usia sekolah dasar yang belajar disini, sudah mampu berpidato dengan bahasa arab dan Turki," ujar Rafli dalam sambutannya.

Kunjungan tersebut turut disambut dengan kebolehan anak-anak yang belajar di Cahaya Aceh dengan keterampilannya berkomunikasi dalam bahasa Arab dan Turki.

"Semoga kemanfaatan program bantuan bina lingkungan ini bisa membantu edukasi dan pembinaan generasi yang berguna masyarakat," tambahnya.

Senada itu Ketua Pembina yang juga Founder Yayasan Cahaya Aceh, Azwir Nazar, mengucapkan terima Kasih atas kedatangan Anggota DPR RI Rafli dan rombongan ke Cahaya Aceh.

"Alhamdulillah dan selamat datang Bang Rafli dan rombongan. Kami sangat senang, Bang Rafli ini sebagai abang dan guru yang Luar biasa. Selama ini beliau baik secara pribadi maupun wakil rakyat di parlemen Jakarta senantiasa mendukung dan mensupport kegiatan Cahaya Aceh," sebut Azwir.

"Hari ini kondisi masih libur Idul Adha, sehingga suasana sepi dari kegiatan belajar, Semoga pada kesempatan yang lain bang Rafli bersedia sempatkan silaturahmi kembali ke Cahaya Aceh," pinta Azwir Nazar, yang juga mantan Presiden PPI Turki.

Kegiatan belajar secara gratis di Cahaya Aceh sudah berlangsung selama 2 tahun lebih dan ditujukan untuk anak-anak kurang mampu agar mendapatkan kesempatan belajar dengan baik.

PKS LEGISLATIVE CORNER

MEMBAHAS ISU DARI
SUDUT YANG PAS

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Live Interactive

Bersama Anggota
Legislatif PKS

SAKSIKAN
SETIAP JUM'AT
pk. 13.30 s.d 14.30 WIB

Fraksi PKS DPR RI fraksipksdprri @fpksdprri fraksi.pks.id

Bertemu Jurnalis Sumbar

Nevi Sampaikan Kinerjanya Sebagai Legislator selama Hampir Setahun

”Sengaja berinteraksi dengan wartawan saat reses ini, karena ibu menilai ada aspirasi riil yang disuarakan kawan-kawan media dalam rangka menggali aspirasi masyarakat untuk masa sidang DPR RI berikutnya

Hj. NEVI ZUAIRINA
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumbar II

Padang (04/08) --- Anggota Fraksi PKS DPR RI Nevi Zuairina dalam rangka reses wakil rakyat, bertemu 30 wartawan berbagai media lokal, di Safari Garden Nipah, Kota Padang, Sumatera Barat, Jumat, (31/07/2020).

”Sengaja berinteraksi dengan wartawan saat reses ini, karena ibu menilai ada aspirasi riil yang disuarakan kawan-kawan media dalam rangka menggali aspirasi masyarakat untuk masa sidang DPR RI berikutnya,” ujar Nevi Zuairina.

Nevi yang terkenal ‘garang’ menyuarakan soal UMKM dan Dana talangan BUMN di Komisi VI DPR RI, menyampaikan bahwa hingga saat ini UMKM masih menjerit karena pandemi belum berakhir.

”Harus ada perhatian khusus pemerintah terhadap kondisi krisis pandemi saat ini, tidak pinjaman ya tapi dana hibah atau bantuan tanpa pengembalian kepada pelaku UMKM terdampak. Kalau perlu ada bimbingan dan pendampingan hingga mereka selamat dari ancaman gelombang jatuhnya ekonomi,” ujar Nevi.

Pada bagian lain, Nevi juga menyampaikan soal kerasnya Fraksi PKS terhadap RUU Cipta Kerja, karena dinilai mengebiri koperasi dan kontradiktif dengan RPJM Nasional serta bisa mematikan industri dalam negeri.

”Mengurus negara ini jangan kesannya baik menurut pemikiran pemerintah saja, tapi harus ada uji aspirasi masyarakat terhadap rencana itu, soal pembahasan, ada pro-kontra itu biasa saja,” ujarnya.

Nevi menambahkan, bahwa serap pendapat masyarakat ini sangat besar pengaruhnya terhadap sebuah kebijakan. Semakin luas jejak pendapat, semakin mengakomodir banyak kepentingan.

Nevi mengatakan, bahwa semua kepentingan tidak dapat diakomodir semua, tapi mengakomodir kemaslahatan masyarakat yang besar skalanya menjadi sangat penting dan mendesak.

Pada saat tanya jawab bersama awak media di Sumbar, Koordinator Kapas yang juga owner www.forumsumbar.com Isa Kurniawan memberikan nilai delapan kepada Nevi Zuairina.

”Sering bersuara dan tidak ragu ngomong soal rakyat, bahkan di Sumbar menjadi ‘media darling’, pantas dan pas bu Nevi selaku wakil rakyat dari Sumbar greatnya atau potennya delapan,” ujar Isa Kurniawan.

Dapat pujian tu Nevi Zuairina dengan gaya khas ke-ibuan hanya menjawab terima kasih.

”Ibu masih harus banyak belajar. Hampir satu tahun ini ibu menyapa 500 titik simpul rakyat. Padahal masa kampanye melebihi 1.000 titik simpul. Proses masih berjalan terus, dan kinerja akan terus dilanjutkan,” ujarnya.

Nevi Zuairina menghadapi curah pikiran awak media dan cukup lihai menjawab

”Ini enaknya bertemu kawan-kawan wartawan, tak semuanya serius, ada guyonan tapi sarat makna perjuangkan aspirasi rakyat. Tidak salah anggapan kalau wartawan itu penyuara aspirasi rakyat tanpa dewan atau wakil rakyat tanpa dewan,” ujar Nevi.

Selama menjadi wakil rakyat, Nevi Zuairina dikenal sebagi ibunya UMKM Indonesia. Pasalnya Nevi Zuairima setiap bersuara pasti selalu menyampaikan kondisi UMKM dan mengajak pemerintah ramah kepada UMKM.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Kukuhkan Pengurus dan Resmikan Majelis Taklim

Sakinah Harap WIA Perkuat Persatuan Umat

"Kuatkan persatuan kita, kalau ada permasalahan kita musyawarahkan. Karena bermusyarawah merupakan sunnah Rasulullah SAW yang mulia. Dakwah ini harus terus, bendera Wanita Islam Al-Khairat harus terus berkibar apapun yang terjadi

Hj. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag
Anggota Komisi X DPR RI

Palu (03/08) -- Majelis taklim sebagai sarana pembinaan umat Islam di Indonesia harus mampu menjadi wadah pemersatu umat.

Pesan ini disampaikan Sakinah Aljufri, Anggota DPR RI Fraksi PKS Dapil Sulawesi Tengah yang merupakan Sekertaris Jenderal Wanita Islam Al-Khairat (WIA) Pusat saat melakukan pengukuhan dan peresmian majelis taklim dalam rangkaian kegiatan reses yang diadakan di Desa Porame, Ahad (03/08/2020).

"Kuatkan persatuan kita, kalau ada permasalahan kita musyawarahkan. Karena bermusyarawah merupakan sunnah Rasulullah SAW yang mulia" ungkap Sakinah dalam sambutannya.

Sakinah berharap agar dakwah Wanita Islam Alkhairaat (WIA) terus berjalan apapun yang akan terjadi.

"Dakwah ini harus terus, bendera Wanita Islam Al-Khairat harus terus berkibar apapun yang terjadi," ungkapnya.

Dakwah Al-Khairat yang telah dirintis oleh Alhabib Idrus bin Salim Aljufri tanpa pamrih, lanjutnya, kita berkewajiban melestarikan, mengembangkan, membesarkannya.

"Harus ada dalam hati kita, saya harus ada di dalamnya bukan apa yang akan saya dapatkan dari dakwah ini namun apa yang harus saya berikan," tegas Sakinah.

Pada kesempatan itu, Sakinah pun mengucapkan selamat kepada pengurus yang telah dilantik.

"Kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim, kita mulai lagi dakwah kita yang beberapa bulan terakhir fakum karena Covid-19, selamat berdakwah menegakkan ajaran Rasulullah," ucap Sakinah.

Turut hadir dalam pelantikan ini, Roswati ketua WIA Mantikole dan Siti Maryam, Ketua WIA Bobo.

Reses di Kabupaten Bekasi

Syaikhu Adakan Pelatihan Hidroponik

Dampak wabah ini luar biasa. Awalnya hanya krisis kesehatan. Tapi kini merambah pada krisis ekonomi dan pangan. Kondisi saat ini mengancam ketahanan pangan kita. Salah satu upaya menguatkan ketahanan pangan dengan hidroponik. Kita bercocok tanam di lahan terbatas

H. AHMAD SYAIKHU
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat V

Bekasi (02/08) --- Isu ketahanan pangan menjadi perhatian Ahmad Syaikhu saat reses. Sebagai bentuk kepeduliannya, Politisi PKS itu pun mengadakan Pelatihan Hidroponik di Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Ahad (02/08).

Menurut Anggota Komisi V DPR RI ini, wabah Covid-19 berdampak signifikan pada bidang kehidupan lain. Semula krisis kesehatan, kini berpotensi besar jadi krisis ekonomi dan pangan.

"Dampak wabah ini luar biasa. Awalnya hanya krisis kesehatan. Tapi kini merambah pada krisis ekonomi dan pangan," ujar Syaikhu.

Krisis pangan ini, lanjut Syaikhu, terjadi karena banyak pekerja yang di PHK. Akibatnya muncul pengangguran baru. Ujungnya berdampak pada turunnya daya beli. Sehingga akhirnya mengancam ketahanan pangan.

"Kondisi saat ini mengancam ketahanan pangan kita," kata Syaikhu.

Karena itu, mantan Wakil Walikota Bekasi itu mengajak masyarakat untuk bergerak melakukan antisipasi. Salah satunya dengan bergiat hidroponik.

"Salah satu upaya menguatkan ketahanan pangan dengan hidroponik. Kita bercocok tanam di lahan terbatas," ajak Syaikhu.

Dalam acara tersebut, Syaikhu memberikan bantuan alat hidroponik kepada tokoh masyarakat.

"Terimakasih Pak Syaikhu. Bantuan ini bermanfaat sekali bagi kami," ujar Puji.

Pelatihan Hidroponik diikuti 150 peserta, dari 23 kecamatan di Kabupaten Bekasi. Dalam kesempatan tersebut Aktivis Petani Kota, BS. Wibowo menjadi salah satu pemateri.

Serap Aspirasi Saat Reses

Nur Azizah Minta Kapolri Resmikan Polsek Jatisampurna Bekasi

Meski saya di Komisi VIII tidak bermitra dengan POLRI namun akan saya upayakan berkordinasi dengan anggota DPR RI di Komisi terkait dari Fraksi PKS.

Hj. NUR AZIZAH TAMHID, B.A.,M.A.
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat VI

Bekasi (02/08) --- Menjalankan tugas sebagai wakil rakyat tak hanya menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat umum, namun diperlukan sinergi dengan para stakeholder.

Mengunjungi beberapa Polsek di daerah pemilihan, Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Nur Azizah Tamhid, meminta Kapolri untuk meresmikan Polsek Jatisampurna, Bekasi.

"Meski saya di Komisi VIII DPR tidak bermitra dengan POLRI namun akan saya upayakan berkordinasi dengan anggota DPR RI di Komisi terkait dari Fraksi PKS," ujar Nur Azizah merespon usulan Kapolsek Pondok Gede untuk segera meresmikan Polsek Jatisampur-na yang saat ini masih dalam wilayah tugas Polsek Pondok Gede.

Sebagai Polsek tertua di Bekasi, lanjutnya, Polsek dengan wilayah tugas meliputi Kecamatan Pondok Gede, Kecamatan Pondok Melati dan Kecamatan Jatisampurna memiliki beban tugas yang tidak ringan dengan jumlah penduduk yang cukup besar.

"Saat ini dengan jumlah personil Polsek Pondok Gede yang terbatas dengan jumlah warga yang banyak perbandingan sekitar 1:3000 warga, sedangkan standar WHO idealnya 1:750 warga," ungkapnya.

"Dengan wilayah yang langsung bersinggungan dengan DKI Jakarta, tentunya memiliki permasalahan sosial yang tidak ringan", imbuhnya.

Nur Azizah mengapresiasi Komitmen kerja 3 pilar di Bekasi yang dinilai cukup baik (Kepolisian,TNI dan Pemda) meski terbatas nya personil sebagaimana yang ada, keamanan dan kondisi di wilayah khususnya Bekasi masih cukup kondusif.

Kehadiran Nur Azizah disambut langsung oleh Kapolsek Pondok Gede Kompol Hersiantony beserta jajarannya.

Selanjutnya Nur Azizah Tamhid mengunjungi Polsek Metro Jatiasih Jl. Swatantra IV No. 01 ET 06/04 , Jatiasih, Bekasi yang langsung diterima oleh Kompol Yulianto, Kapolsek Metro Jatiasih beserta jajarannya.

Kehadiran Nur Azizah di Polsek Pondok Gede dan Polsek Jati Asih didampingi Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Bekasi Drajat Kardono, Anggota DPRD Kota Bekasi FPKS Latu Harhari juga jajaran pengurus DPC PKS Jati Asih dan Pondok Gede.

"Alhamdulillah baik di Polsek Pondok Gede maupun Polsek Jatiasih sambutannya luar biasa, meskipun aparat penegak hukum namun sangat ramah dan bersahaja," ujar Nur Azizah Tamhid.

Kehadiran Nur Azizah mengunjungi polsek-polsek dalam resesnya mendapat apresiasi positif sebagaimana ungkapan Kapolsek Jatiasih sangat senang dan tersanjung mendapat kunjungan Anggota DPR RI.

"Alhamdulillah semenjak saya menjabat baru kali ini dikunjungi Anggota DPR RI," ujar Kapolsek Jatiasih.

Pada kesempatan ini Kapolsek Jatiasih menyampaikn harapan agar Kantor Polsek Jati Asih yang telah dihibahkan Walikota Bekasi segera mendapat sertifikat tanah, agar bisa mengajukan anggaran renovasi ke Mabes Polri dalam rangka renovasi mengingat selama ini selalu mengalami banjir.

Nevi Zuairina Sebar Hewan Kurban di Delapan Kabupaten Kota

Alhamdulillah, kurban ini mendapat dukungan dari masyarakat mulai relawan hingga masyarakat penerima yang dilakukan dengan tertib dan sesuai protokol kesehatan. Tidak menimbulkan kerumunan, tapi efektif berjalan baik proses distribusinya

Hj. NEVI ZUAIRINA
Anggota Komisi VI DPR RI

BERKURBAN BERBAGI DAN TERUS MELAYANI
SELAMAT IDUL ADHA 1441 H

Padang (31/07) --- Anggota DPR RI daerah Pemilihan Sumatera Barat II, Nevi Zuairina melakukan kurban di 50 titik yang tersebar di delapan kabupaten kota. 50 Kambing ini di sebar di Pasaman, 50 Kota, Padang Pariaman, Kota Pariaman, Pasaman Barat, Agam, Bukittinggi dan Payakumbuh.

Selain 50 ekor kambing, Anggota Fraksi PKS ini juga berkurban seekor sapi yang ia serahkan di lingkungan DPP PKS yang berada di Jakarta.

Legislator asal Sumatera Barat ini berharap, semoga semua amal ibadah kita semua dalam moment Idul Adha ini di terima oleh Allah SWT. Semoga berkah kepada semuanya dan ia berharap segala ujian cobaan wabah yang melanda dunia ini segera berakhir.

Nevi mengatakan, meskipun tidak ada haji tahun ini, tapi semangat warga untuk berkurban sangat besar. Antusiasme ini selain untuk meningkatkan ketakwaan kepada yang maha kuasa, juga meningkatkan rasa kepedulian terhadap sesama. Kini saatnya masyarakat menikmati daging kurban dan tidak berpuasa selama 4 hari.

"Alhamdulillah, kurban ini mendapat dukungan dari masyarakat mulai relawan hingga masyarakat penerima yang dilakukan dengan tertib dan sesuai protokol kesehatan. Tidak menimbulkan kerumunan, tapi efektif berjalan baik proses distribusinya", ucap Nevi.

Politisi PKS ini pada moment kurban saat ini agak leluasa bergerak di berbagai daerah karena kegiatan ini bersamaan dengan kegiatan jadwal Reses DPR RI. Turun lapang ini memang terjadwal untuk sekaligus menampung aspirasi masyarakat di daerah pemilihan.

"Kita pada waktu reses ya turun lapang ya. Tidak ada Sidang, karena masa sidang ada waktu dan jadwalnya. Alhamdulillah PKS tetap konsisten menjalankan reses sekaligus beraktivitas di moment hari raya Iedul Adha", tutup Nevi Zuairina.

PKS Partai Besar, Oposisi Bela Umat

Di Pandeglang dan Lebak PKS sebagai partai terbesar dan saya adalah satu-satunya kader PKS yang baru hijrah dan telah membuktikan kemenangan pada pileg kemarin. Saya mengajak terus tingkatkan silaturahmi dengan rakyat demi kemajuan PKS untuk mewujudan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat

DR. H. R. Achmad Dimyati Natakusumah, S.H.,M.H
Anggota Fraksi PKS DPR RI
Dapil Banten I

image : Istimewa

Audiensi dengan Korban Asuransi Bumi Putera

Anis: Saya Bersama Mereka untuk Mendapatkan Haknya

Mereka menceritakan derita perjalanan mereka untuk mendapatkan haknya. Mulai dari buruknya komunikasi pihak manajemen Bumi Putera hingga perlakuan kasar yang mereka dapatkan.

Jakarta (29/07) --- Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, Anis Byarwati menerima permintaan audiensi dari nasabah Asuransi Bumi Putera di gedung DPR RI, Rabu, (29/07).

Nasabah Asuransi Bumi Putera diwakili oleh Fien Mangiri (Jabodetabek), Muhamaad Ali (Jabar), Syakur Usman (Jabodetabek), Muslimatun (Jabodetabek), dan Risa Pribadi (Jabar).

Dalam forum audiensi ini, semua perwakilan nasabah menyampaikan problematika dan harapannya.

Para nasabah yang menjadi korban gagal bayar asuransi Bumi Putera ini, rata-rata telah menyetorkan polis selama 17 tahun dan mengikuti asuransi pendidikan.

Mereka menceritakan derita perjalanan mereka untuk mendapatkan haknya. Mulai dari buruknya komunikasi pihak manajemen Bumi Putera hingga perlakuan kasar yang mereka dapatkan.

Ketidaktahuan nasabah akan informasi lengkap tentang Bumi Putera menyeruak dalam forum ini. Rata-rata nasabah tidak mengetahui adanya Badan Perwakilan Anggota (BPA).

Dan status Bumi Putera yang merupakan perusahaan mutual. Artinya nasabah sekaligus menjadi pemegang saham di perusahaan.

Nasabah korban Bumi Putera juga meminta agar komisi XI mempertemukan mereka dengan pihak manajemen dalam satu forum. Mereka juga menitipkan surat resmi untuk ketua komisi XI kepada Anis.

Menanggapi aduan para nasabah, Anis mengatakan bahwa sebagai wakil rakyat, ia akan berusaha maksimal membantu para nasabah minimal untuk mendapatkan informasi yang jelas. Anis juga mendorong para korban untuk tetap semangat meraih haknya.

"Saya berada bersama dengan Bapak Ibu. Saya akan membantu optimal sesuai dengan wilayah kerja saya. Surat ini akan saya sampaikan kepada ketua komisi XI dan kawan-kawan di komisi XI," katanya.

Saya berada bersama dengan Bapak Ibu. Saya akan membantu optimal sesuai dengan wilayah kerja saya. Surat ini akan saya sampaikan kepada ketua komisi XI dan kawan-kawan di komisi XI

Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si
Anggota Komisi XI DPR RI

PROFIL

Drs. CHAIRUL ANWAR, Apt.

Bagaimana kabar sahabat FPKS DPR RI? Semoga senantiasa sehat dan tetap menjaga jarak aman. Dalam program #KeluargaPKS pekan ini kita akan berkenalan dan bersilaturahmi dengan Drs. Chairul Anwar, Apt. Satu dari dua orang anggota DPR periode 2019-2024 yang memiliki latar belakang profesi sebagai Apoteker. Pria yang lahir di Pekanbaru pada tanggal 13 Oktober 1963 ini merupakan Anggota FPKS DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Riau I sejak tahun 2004.

Kecintaan pada profesi apoteker sudah terasa sejak menempuh studi Sarjana dan Profesi Apoteker di Jurusan Farmasi Universitas Indonesia. Hal itu pula yang kemudian menasbihkan Chairul Anwar sebagai Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Periode 2018-2022. Meski demikian beliau juga 'moncer' sebagai ketua Badan Pemenangan Pemilu dan Pilkada (BP3) DPP PKS, setidaknya Anggota DPR RI PKS periode 2019 – 2024 naik 10 kursi dibandingkan sebelumnya.

Chairul Anwar menikah dengan Hj Meriawati Soear, Apt Wanita asal Payakumbuh Sumatera Barat. Alhamdulillah saat ini dikarunia 7 orang anak terdiri 5 putri dan 2 putra serta 2 orang cucu. Pernikahan ini dibina dengan kasih sayang dan saling pengertian. Kesibukan sebagai Anggota DPR RI tidak melunturkan interaksi Chairul Anwar dengan putra putrinya. Bercengkrama dan berkomunikasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupannya.

Pesan Chairul untuk keluarga Indonesi "Agar terus menjaga ketahanan keluarga karena tantangan masa depan bangsa dapat dilalui dengan memiliki keluarga yang kuat baik dari segi ruhani, jasmani, dan pemikiran. "

> "Agar terus menjaga ketahanan keluarga karena tantangan masa depan bangsa dapat dilalui dengan memiliki keluarga yang kuat baik dari segi ruhani, jasmani, dan pemikiran

SOCMED

Instagram :
chairul.anwar.pks

Facebook :
@pchairulanwar

Twitter :
chairulanwarPKS

You Stay At Home,
We Stay At Parliament
DPR - RI
PARTAI KEADILAN
SEJAHTERA
PKS

Ketahui segala informasi
terkini ikhtiar politik
PKS di Parlemen

Kunjungi

KANAL RESMI FRAKSI PKS DPR RI

Website
fraksi.pks.id

Instagram
fraksipksdprri

Twitter
@fraksipksdprri

Facebook
Fraksi PKS DPR RI

Youtube
PKSTV DPR RI

fraksi.pks.id